



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**T
A
H
U
N**

2019

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak - pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem laporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan “ dan Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto menetapkan 1 (satu) tujuan yang harus dicapai mengacu pada pernyataan Visi Kota dan Misi ke 4 yaitu " **terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel** dengan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) program dan 50 (lima puluh) kegiatan sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Sawahlunto dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2019 untuk yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan – hambatan / permasalahan – permasalahan diungkapkan didalam bab – bab LKjIP ini.

Berbagai keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tersebut diatas akan tetap dipertahankan dan terhadap kelemahan – kelemahan / hambatan – hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Sawahlunto, Januari 2020
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kota Sawahlunto



AFRIDARMAN, SE

Pembina

NIP. 19730710 200312 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mewajibkan setiap Kepala OPD untuk melakukan pengukuran dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 mengacu kepada Revisi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2019 Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2019, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Sawahlunto Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Sawahlunto.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ini dimaksudkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program/kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019.

C. Penjelasan Umum Organisasi

Dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto merupakan Tuntutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan tersebut terdapat fungsi yang melekat pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yaitu :

- A. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 - b. Menyusun rancangan APBD rancangan perubahan APBD
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - d. Melaksanakan fungsi bendaharawan umum daerah
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- B. Selaku Bendaharawan Umum Daerah berwenang:
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
 - b. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD
 - c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran kas
 - d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
 - f. Menyimpan uang daerah
 - g. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - h. Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi
 - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban kas umum daerah
 - j. Menyiapkan pelaksanaan penggunaan dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah
 - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah

C. Selaku Kepala OPD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas pokok, membantu Walikota dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pengendalian pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pengelolaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. Penyelenggaraan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- g. Pembinaan pelaksanaan teknis proses pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan asset daerah;
- h. Pengesahan dokumentasi pelaksanaan anggaran dan menetapkan penyediaan dana;
- i. Penyelenggaraan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis OPD yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- k. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kegiatan Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Kepala BPKAD	: -
Sekretaris BPKAD	: Afridarman, SE
Kepala Bidang Pendapatan Daerah ...	: Fiyandri, ST
Kepala Bidang Perbendaharaan.....	: Rihartanti, SE
Kepala Bidang Anggaran.....	: Yofi Aldiana, SE
Kepala Bidang Asset Daerah	: Desismon, S.Kom, M.Kom
Kepala Bidang PBB dan BPHTB	: Yudaskar, S.Sos

a. Sekretaris membawahi :

1. Kasubbag Adm Umum & Kepegawaian : Ristina Hidayati, S.Sos
2. Kasubag Adm Keuangan & Pelaporan : Tarmiati, S.Sos, MM

b. Kepala Bidang Pendapatan Daerah membawahi :

1. Kasi Pendataan, Analisa dan Pengembangan pendapatan dan Penetapan : Fitri Novita, SE,M.Si
2. Kasi Penagihan : Darmayenni, S.Sos

c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membawahi :

1. Kasi Perbendaraan : Herita Harun,SE
2. Kasi Akuntansi dan Pelaporan : Sri Suwartiningsih, SE
3. Kasi Verifikasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah : Eriwisnetty,S.Sos.

d. Kepala Bidang Anggaran membawahi :

1. Kasi Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan : Reno Islami, ST, M.Cio
2. Kasi Anggaran Belanja Langsung : Sulistikawati, SE
3. Kasi SIKD : Anaffry Rido, S.Kom

e. Kepala Bidang Asset membawahi :

1. Kasi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset : Nurhalili,SE
2. Kasi Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset : Dausri, SH.MM
3. Kasi Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan) : Edy Abrian. M, SE

f. Kepala Bidang PBB dan BPHTB membawahi :

1. Kasi Pelayanan dan Penagihan : Vera Silvia,SE.M.Si
2. Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan : Benny Dwi. V, SAP

g. Staf BPKAD Kota Sawahlunto yang PNS : 19 orang

h. Staf Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah : 4 orang

i. Staf BPKAD Kota Sawahlunto yang Non PNS : 32 orang

3. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber Daya Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto keadaan pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebanyak 77 orang dan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 76 orang dengan golongan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri Sipil /Honor)	Keadaan 2 Januari 2019 (orang)	Keadaan 31 Des 2019 (orang)
IV	7	6
III	28	28
II	10	10
I	-	-
Honor	32	32
Jumlah	77	76

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Pendidikan	Keadaan 2 Januari 2019 (orang)	Keadaan 31 Desember 2019 (orang)
S-3	-	-
S-2	12	10
S-1	21	23
D-III	6	6
D-II	-	-
D-I	1	1
SLTA	5	4
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	45	44

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran SKPD
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2019
- Penghargaan
- Foto-foto pembahasan cascading, pendampingan penyusunan dokumen
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyataan Visi “ Terwujudnya Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel untuk Kelancaran Penyelenggara Pemerintahan “

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mengacu pada **Visi Pemerintah Kota Sawahlunto “ Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan

Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan dan manajemen asset;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. Tujuan, Sasaran OPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi Kota dan Misi ke 4 serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Tujuan yang hendak dicapai untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah **terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.**

Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan indicator sasaran sebagai berikut :
 - Persentase capaian realisasi belanja (quality of budget planning)
 - Maksimal Defisit APBD
 - Persentase caaian realisasi anggaran
 - Persentase capaian realisasi belanja modal (quality of spending) bidang Pendidikan .
 - Persenatase capaian realisasi belanja modal (quality of spending biang Kesehatan.
2. Mengelola Pendapatan Daerah dengan indikator persentase capaian realisasi pendapatan (fiscal space)
3. Mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan indicator persentase OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel.

C. Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto selama tahun 2019 Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Visi dan Misi. Rencana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2019 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah melaksanakan fungsi pokoknya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto harus dapat mengaplikasikan aturan yang ada, sehingga keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya, keberhasilan pencapaian sasaran ini jika dihitung indikator keberhasilan pencapaian belum 100%.

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai masih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat output, pada hal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat outcome.

Pencapaian sasaran yang ideal memang seharusnya diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome, namun demikian indikator outcome masih belum sepenuhnya tercapai hal ini disebabkan antara lain : Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Sasaran Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4
1.	Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	√	
	- Persentase Capaian realisasi Belanja (Quality of Budget planning)	√	
	- Maksimal defisit	√	
	- Persentase Capaian realisasi anggaran	√	
	- Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spending) Bidang Pendidikan	√	
	- Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spending) Bidang Kesehatan	√	
2.	Mengelola Pendapatan Daerah	√	
	- Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiscal Space)	√	
3.	Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	√	
	- Persentase OPD dengan laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel	√	

TABEL 3. 2
PERBANDINGAN ANTAR TARGET DAN REALISASI KINERJA 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan (DO)	Rumus Penghitungan Indikator/Definisi Operasional	Target Capaian Setiap Tahun			Sumber Data	Penanggung jawab
						2018	2019	Realisasi		
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Opini BPK terhadap - Persentase Capaian realisasi Belanja (Quality of Budget planning)	%	- $\frac{\text{Realisasi belanja APBD}}{\text{Pagu Belanja APBD}} \times 100$ - $\frac{622.472.823.122,01}{699.091.718.540,00} \times 100$ 89,04%	WTP 90%	WTP 90%	90%	BPKAD BPKAD	BPKAD Bidang Anggaran
			- Maksimal Defisit APBD		- $\frac{\text{Realisasi Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)}}{\text{Total belanja}} \times 100$ - $\frac{13.369.052.535,47}{699.091.718.540,00} \times 100$ 1,91%	0%	0%	0%	BPKAD	
			Persentase Capaian - realisasi anggaran	%	- $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$ - $\frac{652.448.890.285,20}{718.044.090.294,66} \times 100$ 90,86%	85%	85%	85%		
			- Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spending) Bidang Pendidikan	%	- $\frac{\text{Realisasi Realisasi Belanja Modal Bidang Pendidikan}}{\text{Realisasi Realisasi Belanja Pendidikan}} \times 100$ - $\frac{13.497.221.098,00}{127.875.874.234,00} \times 100$ 10,55%	20%	20%	20%		Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

	- Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spending) Bidang Kesehatan	%	- Realisasi Realisasi Belanja Modal Bidang Kesehatan $\frac{\text{Realisasi Realisasi Belanja Kesehatan}}{\text{Modal Bidang Kesehatan}} \times 100$ - $\frac{11.351.248.882,00}{115.990.918.885,00} \times 100$ 9,79%	10%	10%	10%	10%	BPKAD	Bidang Pendapatan
2.	Mengelola Pendapatan Daerah	%	- Realisasi Pendapatan Daerah Target Pendapatan Daerah $\frac{639.511.463.488,09}{671.749.080.316} \times 100$ 95,20%	95%	95%	95%	95%	BPKAD	Bidang Pendapatan
		%	- Realisasi (PBB + BPHTB) Realisasi PAD $\frac{1.365.487.969,00}{57.170.993.865,09} \times 100$ 2,39%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	BPKAD	Bidang PBB
3.	Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	%	- Laporan BMD OPD yang akurat dan Akuntabel Jumlah OPD $\frac{23}{26} \times 100$ 88,46%	90%	90%	91%	95%	BPKAD	Bidang Aset

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dalam pencapaian program Tahun 2019 diukur berdasarkan kinerja keluaran. Dengan demikian walaupun secara teoritis capaian program diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada kinerja hasil, namun pengukuran berdasarkan kinerja hasil tersebut masih belum dan kinerja pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat terlihat kinerjanya. Dengan alasan tersebut maka capaian program diukur berdasarkan kinerja keluaran.

Untuk lebih jelasnya capaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Sasaran Strategis

Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, dimana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut tampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat. Arah kebijakan keuangan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 meliputi arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan daerah Tahun 2019.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang paling strategis diupayakan adalah tertutupinya defisit belanja setiap tahunnya atau setidaknya terjadinya penurunan defisit daerah dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan defisit daerah ini terutama diupayakan melalui peningkatan pendapatan daerah disamping melakukan upaya efisiensi dan rasionalisasi pengeluaran daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan publik yang harus dipenuhi.

3.1.1 Indikator Kinerja

Persentase capaian realisasi belanja (Quality of Budget Planning)

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.

Indikator kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase capaian realisasi belanja (Quality of Budget Planning)	$\frac{\text{Realisasi Belanja APBD} \times 100\%}{\text{Pagu Belanja APBD}}$	90%	87,90%	97,78%

Pengukuran Kinerja

$$= \frac{\text{Rp.622.472.823.122,00}}{\text{Rp.699.091.718.540,00}} \times 100\%$$

$$= 87,90 \%$$

Untuk Belanja secara umum realisasi belanja APBD berjumlah Rp.622.472.823.122,01 dari yang dianggarkan sebesar Rp 699.091.718.540,00 atau 87,90%. Komposisi realisasi belanja di Tahun 2019 secara garis besar dibagi tiga, yaitu belanja operasi dan belanja modal serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

Belanja	Realisasi (Rp)	Bobot (%)
Belanja Operasi	457.292.466.687,51	91,72
Belanja Modal	94.384.258.018,50	73,52
Belanja Transfer	70.728.943.435,00	99,07
Belanja Tidak Terduga	67.154.981,00	8,95
Jumlah	622.472.823.122,01	87,90

Komposisi masing-masing belanja sebagian besar diserap oleh Belanja Operasi yang mencapai 91,72% dan Belanja Modal mencapai 73,52%, dan Belanja Transfer mencapai 99,07% dan Belanja Tidak Terduga 8,95%.
Sedangkan jika dilihat berdasarkan OPD, maka jumlah realisasi belanja untuk tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

No	OPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	130.689.664.257,00	122.370.091.659,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	66.254.207.725,00	53.880.112.305,00
3	RSUD/ BLUD	66.118.128.203,00	62.181.246.195,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.359.345.940,00	75.382.121.310,00
5	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	28.014.580.870,00	22.938.134.533,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.081.849.079,00	8.398.051.630,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	8.954.041.486,00	8.229.946.130,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	17.955.577.826,00	16.566.747.315,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.273.866.624,00	3.965.156.182,00
10	Dinas Perhubungan	4.557.373.221,00	4.321.099.100,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9.267.498.997,00	8.592.383.159,50
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.325.270.699,00	4.716.834.435,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.366.451.919,00	4.079.521.922,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Museum	9.461.183.945,00	8.368.690.155,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	13.304.567.456,00	11.653.353.951,00
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.149.313.950,00	7.072.528.725,00

17	PPKD	83.626.516.383,00	80.789.809.107,51
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.893.699.588,00	14.220.253.746,00
19	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.627.468.663,00	10.433.562.948,00
20	Inspektorat	5.576.497.957,00	5.257.068.111,00
21	Sekretariat Daerah	35.199.607.801,00	32.037.251.884,00
22	Sekretariat DPRD	21.643.301.660,00	19.707.364.059,00
23	Walikota dan Wakil Walikota	568.393.002,00	561.779.168,00
24	DPRD	6.924.538.050,00	6.528.585.944,00
25	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	19.752.166.646,00	7.599.885.322,00
26	Kecamatan Barangin	8.487.591.308,00	7.894.732.378,00
27	Kecamatan Lembah Segar	10.528.995.835,00	9.776.301.827,00
28	Kecamatan Silungkang	2.493.409.712,00	2.374.810.255,00
29	Kecamatan Talawi	2.636.609.738,00	2.575.399.666,00
Jumlah		699.091.718.540,00	622.472.823.122,01

- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra.

Capaian indikator kinerja tahun 2019 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2018 dapat dilihat dari table berikut ini :

Indikator kinerja	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi belanja (Quality of Budget Planning)	90,93%	90%	87,90%	97,78%	90%	97,78%

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2019 merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengintegrasikan dan menyelaraskan antara program pemerintah, program provinsi dan program Kota Sawahlunto yang dalam penyusunannya didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat yang dipadukan dengan program dari SKPD di lingkungan pemerintah kota.

APBD juga mencerminkan besaran pengalokasian anggaran dari setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan dan menjalankan roda pembangunan daerah sebagai kelanjutan dari program pembangunan tahun sebelumnya.

Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Prioritas belanja diarahkan pada pendanaan bagi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 pada 14 bidang, yakni:

- a. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing.
- b. Pengembangan sektor kepariwisataan Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing.
- c. Pengembangan infrastruktur yang adil dan merata.
- d. Peningkatan kesalehan sosial melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budi pekerti.
- e. Menjalin kehidupan sosial yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama.

- f. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter.
- g. Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.
- h. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Lanjutan sapu bersih kemiskinan.
- j. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan disemua bidang dan terjaminnya keteraan gender.
- k. Peningkatan kualitas olahraga dan pembinaan kepemudaan.
- l. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang.
- m. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah.
- n. Perluasan jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional.

Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2019 harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan regulasi penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 dengan mempedomani hal sebagai berikut:

a. Anggaran berbasis kinerja

Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.

b. Anggaran Pendidikan minimal 20%

Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2019 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).

Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

c. Anggaran Kesehatan minimal 10%

Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, tentang kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.

d. *Fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost*

Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
- 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi OPD, meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan;
- 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD.

e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Prioritas Pembangunan

Kebijakan pembangunan Tahun 2019 diarahkan untuk mempercepat mewujudkan visi kota dengan kebersamaan kita wujudkan Sawahlunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, dan pengembangan ekonomi kerakyatan berkelanjutan dan sejalan dengan program nasional maka strategi dan prioritas pembangunan Tahun 2019 meliputi:

- 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing

Mengembangkan ekonomi kerakyatan masih tetap diarahkan pada pengembangan pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sekaligus dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan bibit, pemberdayaan petani dan penyuluh, penerapan teknologi dan manajemen usaha tani, jaringan irigasi desa serta pembukaan jalan sentra produksi.

Peningkatan nilai tambah dari produksi kakao melalui penumbuhan dan pengembangan industri kecil pengolahan biji kakao menjadi produk makanan dan bahan makanan. Disamping itu perluasan basis produksi dan pengembangan tenun songket tetap dijadikan salah satu andalan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan sentra industri kaos dan pakaian olahraga juga merupakan salah satu kebijakan di Tahun 2019.

- 2) Pengembangan infrastruktur yang adil dan merata

Penyediaan infrastruktur dasar sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi dan interaksi sosial masyarakat, karena itu untuk mendorong perkembangan wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur menjadi prioritas utama.

Pembangunan infrastruktur diarahkan guna mewujudkan infrastruktur kota yang mencukupi sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi warga kota dalam beraktivitas dan wisatawan yang datang berkunjung dengan memprioritaskan kepada memelihara dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, penyediaan Moda transportasi yang memadai, aman dan nyaman, meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi meningkatkan kualitas perumahan warga kurang mampu, penyediaan fasilitas sosial dan pemerintah, peningkatan pengelolaan persampahan, perbaikan prasarana sarana dan utilitas permukiman, pengelolaan ruang terbuka hijau dan penyediaan fasilitas penerangan jalan umum, pengelolaan sumberdaya air bagi kepentingan irigasi dan air minum, membangun infrastruktur penunjang kepariwisataan.

Namun pembangunan sarana air limbah perkotaan, infrastruktur kepariwisataan, kualitas jalan dan jembatan, sarana pemerintahan Desa/Kelurahan dan penyediaan sarana olahraga memperoleh porsi lebih besar dari tahun sebelumnya. Melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan tercipta pertumbuhan yang seimbang antara pembangunan perkotaan dengan pengembangan perdesaan.

- 3) Peningkatan Kesalehan Sosial melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat dan Budi Pekerti

Pembinaan kehidupan beragama ditujukan untuk meningkatkan pengamalan ajaran beragama ditengah kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan suasana religius.

Hal ini dapat tercermin dari peningkatan kualitas dan intensitas peribadatan, pendidikan keagamaan yang berkembang, toleransi antar umat beragama dan terciptanya suasana yang kondusif untuk melaksanakan ibadah dan perayaan hari besar keagamaan serta ditunjang oleh keberadaan tokoh agama selaku pembinaan dan pembimbing spritual.

Pelestarian nilai budaya tetap diarahkan pada upaya untuk menjaga kelestarian adat istiadat, kesenian dan seluruh produk kebudayaan yang tumbuh, hidup dan berkembang di Kota Sawahlunto. Peningkatan pemahaman nilai budaya dan kepedulian terhadap adat istiadat di kalangan generasi muda masih merupakan sasaran yang hendak dicapai.

- 4) Menjalin kehidupan sosial yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama

Keragaman budaya, etnis dan agama yang ada di Kota Sawahlunto merupakan aset bagi daerah. Melalui pangelaran budaya dan pembinaan keagamaan dalam Forum Koordinasi umat beragama (FKUB) kehidupan sosial yang harmonis antar umat beragama dan budaya di Kota Sawahlunto dapat terus dijalin dan dibina.

- 5) Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter

Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas lulusan setiap jenjang pendidikan yang memiliki kompetensi di bidangnya agar mampu bersaing dan meneruskan pendidikan pada tingkat lebih tinggi sehingga angka rata-rata lama sekolah dapat meningkat. Penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran dan dibantu dengan suasana belajar yang kondusif menjadi perhatian utama.

Pencegahan dan pengurangan angka putus sekolah juga masih merupakan salah satu isu utama yang harus ditangani melalui pemberian beasiswa dan program wajib belajar 12 tahun serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat. Disamping hal tersebut diatas untuk membentuk siswa yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual semata tetapi juga diimbangi dengan kecerdasan emosional dan spritual dapat diwujudkan melalui penerapan pendidikan berkarakter. Pembinaan generasi muda melalui aktivitas olahraga dan seni merupakan sebagian dari upaya pembentukan karakter pemuda.

- 6) Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

Menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kota Sawahlunto, kerja sama antar Pemerintah Kota Sawahlunto. Institusi keamanan dan tokoh masyarakat. Peran serta tokoh masyarakat sangat penting dalam mencegah aktifitas yang melanggar hukum serta menegakan supremasi hukum dan HAM ditengah masyarakat.

- 7) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diutamakan melalui upaya preventif melalui pembiasaan pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dari tingkat bawah seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Tingkat PAUD. Perlindungan dan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pola subsidi akan terus dilanjutkan, begitu juga dengan penataan sistim rujukan guna mendukung pelaksanaan BPJS kesehatan secara Nasional.

Dalam pelayanan kesehatan baik pada tingkat layanan dasar di Puskesmas maupun layanan lanjutan di Rumah Sakit perlu terus ditingkatkan sumberdaya manusia tenaga medis, peningkatan fasilitas pelayanan serta memenuhi peralatan kedokteran yang dibutuhkan.

Upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, mengurangi angka kematian bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular akan terus dilanjutkan. Di samping itu perbaikan sanitasi dan penyediaan air minum yang layak juga menjadi prioritas utama

8) Lanjutan sapu bersih kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Tahun 2019 diarahkan pada penggunaan satu data tunggal hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2016 yang proses pendataannya melibatkan unsur pemerintah terdepan dan unsur masyarakat sehingga diharapkan semua *stakeholders* penanggung jawab penanggulangan kemiskinan dapat fokus untuk bergerak bersama-sama dalam menanggulangi kemiskinan dengan satu data yang disepakati di tingkat kota.

Di samping itu juga akan diaplikasikan pendekatan Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan (PPK) dalam proses perencanaan program/kegiatan. Beberapa program/kegiatan yang berpotensi memiliki sasaran Rumah Tangga Miskin akan diidentifikasi dan secara kuantitatif ditentukan berapa alokasi dari manfaat program/kegiatan tersebut yang memiliki sasaran individu atau RumahTangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penanggulangan Kemiskinan.

- 9) Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.

Peran serta perempuan dalam pembangunan tidak bisa kita abaikan untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap kaum perempuan baik dalam kehidupan sosial maupun dalam berpolitik.

Kesetaraan gender bukanlah hal baru dalam pemerintahan di Kota Sawahlunto. Namun untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kesetaraan gender ini, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Peningkatan kualitas olahraga dan pembinaan kepemudaan.

- 10) Peningkatan kualitas olahraga dan pembinaan kepemudaan

Saat ini, kegiatan keolahragaan sangat digalakan oleh pemerintah Kota Sawahlunto. Untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga masyarakat dan memasyarakatkan olahraga berbagai event telah dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.

- 11) Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto menyiapkan langkah-langkah penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Aparatur sipil negara sebagai pemegang peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Menyempurnakan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien serta membuat ruangan pelayanan yang representatif diseluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

12) Pengembangan sektor kepariwisataan

Pengembangan kepariwisata diutamakan untuk menggali dan merencanakan objek pariwisata yang potensial baik secara kualitas maupun kuantitas. Potensi ini berupa sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan warisan seni dan budaya.

Tahun 2019 ditetapkan kebijakan Akselerasi pengembangan pariwisata Kota Sawahlunto dengan memprioritaskan: Persiapan menuju kota Kreatif, Pengembangan *MICE tourism* (*Meeting (M), Incentive (I), Conference (C), Event (E)*), pengembangan *heritage tourism* kawasan kota lama, pengembangan manajemen tata ruang yang mengacu pada nilai konservasi dan pelestarian, pengembangan aktivitas pariwisata yang mampu menciptakan mata rantai nilai tambah yang tinggi, peningkatan mutu rumah makan/restoran dan akomodasi, peningkatan promosi wisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam aktivitas wisata.

13) Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah

Percepatan pembangunan Kota Sawahlunto dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak ketiga dalam rangka membantu pembangunan sarana dan prasarana serta menanam investasi sesuai potensi yang dimiliki Kota Sawahlunto.

14) Perluasan jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional

Peluasan kerjasama ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto dengan melakukan kerjasama dengan Kota/Kabupaten lainnya baik secara ekonomi dan sosial serta melakukan peningkatan promosi produk lokal Kota Sawahlunto melalui media.

Empat belas program prioritas pembangunan di Kota Sawahlunto telah selaras untuk mendukung program prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 merupakan tahun Ketiga dari RPJMD 2016 – 2021. Untuk Rencana Prioritas Pembangunan Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan prioritas pembangunan pada tahun sebelumnya yakni tetap 10 prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan mental dan pengamalan agama serta ABS SBK dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
- c. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
- f. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, UMKM dan Koperasi serta investasi.
- g. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
- h. Penurunan tingkat kemiskina dan pengangguran serta daerah tertinggal.
- i. Pengembangan energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
- j. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2019 disusun sebagai pejabaran operasional dari strategi pembangunan nasional dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan nasional sesuai Nawa Cita Program Jokowi – JK yang dirumuskan dalam RPJMN yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis.

- c. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 - d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 - e. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
 - f. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.
 - g. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
 - h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
 - i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.
- c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Sawahlunto merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp 671.749.080.316,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, masing-masing berjumlah sebesar Rp 59.758.667.807,00 dan sebesar Rp 550.953.042.509,00, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp 61.037.370.000,00. Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp 699.091.718.540,00.

Kekurangan dana untuk membiayai belanja dan transfer selama tahun 2019 akan didanai dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu senilai Rp 4.848.420.336,05 Pinjaman Dalam Negeri Rp. 10.264.803.088,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp 31.181.786.554,61 dan dikurangi dengan rencana pengeluaran pembiayaan senilai Rp 18.952.371.754,66 yang diperuntukkan bagi Penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri masing-masing Rp 7.520.902.000,00 dan Rp 11.431.469.754,66.

Pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang melebihi pendapatan yang ditargetkan diterima di tahun 2019. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut :

Tabel Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan TA 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$
A.	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Daerah	59.758.667.807,00	57.170.993.865,09	95,67
2	Dana Perimbangan Transfer Pusat	550.953.042.509,00	521.592.899.623,00	94,67
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	61.037.370.000,00	60.747.570.000,00	99,53
	Jumlah Pendapatan Th 2019(A)	671.749.080.316,00	639.511.463.488,09	95,20
B.	Belanja dan Transfer			
1	Belanja Operasi	498.572.264.780,00	457.292.466.687,51	91,72
2	Belanja Modal	128.379.222.377,00	94.384.258.018,50	73,52
3	Belanja Tak Terduga	750.000.000,00	67.154.981,00	8,95
4	Transfer	71.390.231.383,00	70.728.943.435,00	99,07
	Jumlah Belanja TA 2019(B)	699.091.718.540,00	622.472.823.122,01	89,04
C.	Surplus/(Defisit) TA 2019 (A-B)	(27.342.638.224,00)	17.038.640.366,08	(62,32)
D.	Pembiayaan			
1	Penerimaan	46.295.009.978,66	12.937.426.797,11	27,95
2	Pengeluaran	18.952.371.754,66	16.607.014.627,72	87,62
	Pembiayaan Netto (D)	27.342.638.224,00	(3.669.587.830,61)	(13,42)
E.	SiLPA (C+D)	0,00	13.369.052.535,47	

Dampak terhadap pengelolaan Keuangan daerah :

- Realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai 100%, maka pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Sawahlunto harus berupaya maksimal dalam menggenjot tingkat penerimaan pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer. Terutama Dana Insentif Daerah yang pada tahun anggaran 2020 Kota Sawahlunto belum berhasil memperolehnya sebesar Rp.27.500.000,00 dengan alasan Kota Sawahlunto belum memenuhi nilai ambang batas yakni 76 (B).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan menanyakan perihal tersebut. Selanjutnya, Kementerian Keuangan melalui surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-478/PK/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Penjelasan Perhitungan Alokasi DID 2020 , menjelaskan sebagai berikut :

1. DID dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi dan kabupaten/kota atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/ pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah; pelayanan umum pemerintahan; pelayanan dasar publik; dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengalokasian DID untuk masing-masing daerah dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja :
 - a. Kriteria utama, merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID. Jika memenuhi kriteria utama, maka pemerintah daerah berhak ikut pengujian kategori berikutnya yaitu kategori kinerja.

b. Kategori kinerja merupakan kategori yang dihitung dan dialokasikan sebagai berikut :

- 1) Penilaian untuk sembilan kelompok kategori kinerja, yaitu: (1) kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, (2) pelayanan dasar publik bidang pendidikan, (3) pelayanan dasar publik bidang kesehatan, (4) pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, (5) kesejahteraan masyarakat, (6) Pelayanan Umum Pemerintahan, (7) peningkatan ekspor, (8) peningkatan investasi, dan (9) pengelolaan sampah.
- 2) Dihitung berdasarkan penilaian peningkatan kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir untuk kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kelompok kategori kesejahteraan masyarakat, kelompok kategori ekspor, kelompok kategori peningkatan investasi.

Daerah yang mendapatkan DID adalah daerah yang memiliki nilai kinerja di atas batas nilai yang ditentukan. Sedangkan untuk kategori mandatory spending dan ketepatan waktu pelaporan dinilai berdasarkan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Penghargaan/ diusulkan dari Kementerian/ Lembaga Negara untuk kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan, kelompok kategori pengelolaan sampah, dan kategori pembiayaan kreatif.

- c. Data-data yang dipakai dalam kriteria utama dan perhitungan kinerja bersumber dari realisasi APBD Pemerintah Daerah, BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PANRB, BAPPENAS, BKPM, PT.Multi Infrasktruktur, dan LKPP.
3. Berdasarkan butir (2) diatas, maka perhitungan untuk Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :
- a. Berhasil memenuhi 4 (empat) kriteria utama, yaitu :
- 1) Opini BPK atas LKPD 2018 (WTP);
 - 2) Penetapan Perda APBD tahun 2019 pada tanggal 28 Desember 2018 (tepat waktu);
 - 3) Penyusunan anggaran sudah menggunakan e-budgeting; dan
 - 4) Pengadaan barang dan jasa sudah melalui e-procurement;
- b. Untuk kategori kinerja, dari 9 kelompok kategori Kota Sawahlunto belum memenuhi ambang batas nilai yang ditetapkan yaitu 76 (B). Selain itu, Kota Sawahlunto juga tidak mendapatkan penghargaan atau diusulkan oleh Kementerian/Lembaga Negara terkait sesuai rincian di bawah:
- 1) Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a) Kategori kemandirian daerah mendapatkan nilai 25 (E).
 - b) Kategori realisasi belanja mendapatkan nilai 50 (E).
 - c) Kategori kualitas belanja modal pendidikan mendapatkan nilai 30 (E).

- d) Kategori kualitas belanja modal kesehatan mendapatkan nilai 45 (E).
 - e) Belum berhasil memenuhi kewajiban mandatory spending yang terdiri dari : pemenuhan belanja pendidikan, pemenuhan belanja kesehatan, pemenuhan alokasi dana desa dan pemenuhan belanja infrastruktur,
 - f) Belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan tepat waktu yang terdiri dari : laporan penyampaian APBD 2019, laporan semester I APBD 2019, dan laporan pertanggungjawaban APBD 2018.
- 2) Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat:
- a) Kategori penurunan tingkat kemiskinan mendapatkan nilai 55 (D).
 - b) Kategori IPM mendapatkan nilai 35 (D).
- 3) Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan:
- a) Kategori peta mutu pendidikan mendapatkan nilai 65 (C).
 - b) Kategori rata-rata nilai UN mendapatkan nilai 45 (C).
 - c) Kategori angka partisipasi murni mendapatkan nilai 45 (C).
- 4) Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan:
- a) Kategori penurunan stunting mendapatkan nilai 60 (D).
 - b) Kategori persentase balita mendapat imunisasi lengkap mendapatkan nilai 50 (D).
 - c) Kategori persentase persalinan di fasilitas kesehatan mendapatkan nilai 40 (D).

- 5) Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur:
 - a) Kategori sumber air minum layak mendapatkan nilai 55 (D).
 - b) Kategori akses sanitasi layak mendapatkan nilai 60 (D).
- 6) Kelompok Kategori Peningkatan Eksport yang dinilai berdasarkan kategori peningkatan ekspor, Kota Sawahlunto mendapatkan nilai 30 (D).
- 7) Kelompok Kategori Peningkatan Investasi yang dinilai berdasarkan kategori peningkatan investasi, Kota Sawahlunto mendapatkan nilai 25 (E).
- 8) Untuk kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan, kelompok kategori pengelolaan sampah, dan kategori pembiayaan kreatif, Kota Sawahlunto tidak mendapatkan penghargaan atau diusulkan Kementerian / Lembaga Negara terkait.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kota Sawahlunto **telah memenuhi kriteria utama namun tidak mendapatkan alokasi DID karena belum memenuhi ambang batas nilai yang ditetapkan yaitu 76 (B) serta tidak mendapatkan penghargaan atau diusulkan oleh Kementerian / Lembaga Negara terkait.**

- Dengan tidak menerimanya DID dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar kurang lebih Rp38,5 M, maka akibatnya ada beberapa program kegiatan yang tidak bisa dianggarkan pada tahun anggaran 2020 dan melakukan efisiensi belanja dikarenakan jumlah deficit yang semakin besar. Apabila Pemko Sawahlunto tidak melakukan upaya untuk peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, maka dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap pengelolaan keuangan daerah.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Indikator penggunaan sumber daya	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi belanja (Quality of Budget Planning)	91,78	85	90,86	106,89	85	106,89

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Rp. 652.448.890.285,20}}{\text{Rp. 718.044.090.294,66}} \times 100 \%$$

$$= 90,86 \%$$

Penatausahaan belanja merupakan usaha yang tidak kalah pentingnya dibandingkan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan pendapatan. Meskipun pendapatan meningkat secara signifikan, jika tidak didukung perbaikan aspek pengeluaran (belanja) maka program pembangunan akan mengalami stagnan bahkan kemunduran. Oleh karena itu, penatausahaan belanja sejak proses penganggaran, perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan harus dikendalikan dengan baik.

Umumnya hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, yakni:

- Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah melakukan pergeseran anggaran.
- Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya karena kondisi alam yang tidak diinginkan, seperti bencana alam.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.

- d. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

Sedangkan pengendalian belanja dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Sinkronisasi kegiatan yang sejenis dan saling mendukung di masing-masing OPD untuk pemborosan karena kegiatan yang tumpang tindih. Sinkronisasi dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan musrenbang yang lebih akuntabel.
- b. Harmonisasi standar belanja dan sub rekening belanja kegiatan sejenis di masing-masing OPD dengan prinsip dasar efisiensi dan ekonomis.
- c. Mengefektifkan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto tanpa intervensi negatif dari pihak manapun.
- d. Menatausahakan pencairan, verifikasi, pelaporan kegiatan yang lebih akuntabel dan lebih sederhana
- e. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

3.1.2 Indikator Kinerja

Maksimal Defisit APBD

- a. Perbandingan antara target dan realisasi defisit tahun 2019

Indikator defisit APBD	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi defisit	0,76	0	1,91	-	0	-

$$= \frac{\text{Realisasi SILPA}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{13.369.052.535,47}{699.091.718.540,00} \times 100 \%$$

$$= 1,91 \%$$

Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2019 mengalami **surplus** dari kegiatan anggaran sebesar Rp 13.369.052.535,47.

a. Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan netto Tahun 2019 adalah sebesar Rp 27.342.638.224,00 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp.46.295.009.978,66 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.18.952.371.754,66

b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh SiLPA Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 13.369.052.535,47 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas pada Kas Daerah	Rp. 11.151.000.673,49
2) Kas di Bendahara Penerima	Rp. 2.305.871,00
3) Kas pada BLUD	Rp. 457.111.671,98
4) Kas JKN	Rp. 1.413.015.725,00
5) Kas BOS	Rp 345.618.594,00

3.1.3 Indikator Kinerja

Persentase capaian realisasi anggaran

Indikator kinerja anggaran	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi anggaran	91%	85%	90,86%	105%	85%	105%

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100 \%$$

$$= \frac{652.448.890.285,20}{718.044.090.294,66}$$

$$= 90,86 \%$$

Data Dukung :

No	Uraian	Realisasi anggaran	Target Anggaran
1.	Pendapatan-LRA	639.463.463.488,09	671.749.080.316,00
2.	Penerimaan Pembiayaan	12.937.426.797,11	46.295.009.978,66
	Jumlah.....>	652.448.890.285,20	718.044.090.294,66

3.1.4. Indikator Kinerja

Persentase capaian Realisasi Belanja Modal Bidang Pendidikan

Persentase capaian realisasi anggaran

Indikator kinerja anggaran	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi anggaran	10,15	20%	10,55%	53%	20%	53%

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal Bidang Pendidikan}}{\text{Realisasi Belanja Pendidikan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp13.497.221.098}}{\text{Rp127.875.874.234}} \times 100\%$$

$$= 10,55\%$$

Data Dukung :

No	Uraian	Realisasi anggaran
1.	Belanja Modal Bidang Pendidikan dengan rincian sebagaimana terlampir	13.497.221.098
2.	Realisasi Belanja Pendidikan :	127.875.874.234
	- Pendidikan	122.285.067.599
	- Kepemudaan dan olah raga	1.639.359.113
	- Perpustakaan	3.951.447.522



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran I.3 PERDA PERTANGGUNG
JAWABAN : TAHUN 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI			JUMLAH	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0,00	22.560.554.715,00	13.497.221.098,00	36.057.775.813,00	(4.667.219.322,00)	87,06	
		0,00	20.481.680.676,00	10.908.875.815,00	31.390.556.491,00			
1.01	Pendidikan	0,00	22.464.624.715,00	13.497.221.098,00	35.961.845.813,00	(4.656.313.382,00)	87,05	
		0,00	20.396.656.616,00	10.908.875.815,00	31.305.532.431,00			
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	22.464.624.715,00	13.497.221.098,00	35.961.845.813,00	(4.656.313.382,00)	87,05	
		0,00	20.396.656.616,00	10.908.875.815,00	31.305.532.431,00			
1.01.1.01.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	22.464.624.715,00	13.497.221.098,00	35.961.845.813,00	(4.656.313.382,00)	87,05	
		0,00	20.396.656.616,00	10.908.875.815,00	31.305.532.431,00			
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	7.749.300.060,00	0,00	7.749.300.060,00	(655.952.693,00)	91,54	
		0,00	7.093.347.367,00	0,00	7.093.347.367,00			
1.01.1.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	(1.293.800,00)	78,44	
		0,00	4.706.200,00	0,00	4.706.200,00			
1.01.1.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	(2.328.794,00)	97,97	
		0,00	112.671.206,00	0,00	112.671.206,00			
1.01.1.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	(15.250,00)	99,86	
		0,00	10.984.750,00	0,00	10.984.750,00			
1.01.1.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	(94.600,00)	99,91	
		0,00	109.905.400,00	0,00	109.905.400,00			
1.01.1.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	0,00	42.142.560,00	0,00	42.142.560,00	(134.280,00)	99,68	
		0,00	42.008.280,00	0,00	42.008.280,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00 0,00	9.500.000,00 9.496.900,00	0,00 0,00	9.500.000,00 9.496.900,00	(3.100,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00 0,00	9.700.000,00 9.520.000,00	0,00 0,00	9.700.000,00 9.520.000,00	(180.000,00)	98,14	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00 0,00	566.652.500,00 402.537.900,00	0,00 0,00	566.652.500,00 402.537.900,00	(164.114.600,00)	71,04	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00 0,00	592.050.000,00 583.286.731,00	0,00 0,00	592.050.000,00 583.286.731,00	(8.763.269,00)	98,52	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	0,00 0,00	5.409.455.000,00 4.949.775.000,00	0,00 0,00	5.409.455.000,00 4.949.775.000,00	(459.680.000,00)	91,50	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	0,00 0,00	862.800.000,00 843.550.000,00	0,00 0,00	862.800.000,00 843.550.000,00	(19.250.000,00)	97,77	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	0,00 0,00	15.000.000,00 14.905.000,00	0,00 0,00	15.000.000,00 14.905.000,00	(95.000,00)	99,37	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00 0,00	1.122.140.873,00 1.025.749.063,00	200.000.000,00 197.493.000,00	1.322.140.873,00 1.223.242.063,00	(98.898.810,00)	92,52	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000.000,00 97.866.000,00	100.000.000,00 97.866.000,00	(2.134.000,00)	97,87	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00 0,00	200.000.000,00 199.875.250,00	0,00 0,00	200.000.000,00 199.875.250,00	(124.750,00)	99,94	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00 0,00	198.125.500,00 184.347.246,00	0,00 0,00	198.125.500,00 184.347.246,00	(13.778.254,00)	93,05	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00 0,00	74.650.000,00 74.624.750,00	0,00 0,00	74.650.000,00 74.624.750,00	(25.250,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 48	Facilitasi Kegiatan Penunjang Unit Layanan Pendidikan 4 Kecamatan se Kota Sawahlunto	0,00 0,00	649.365.373,00 566.901.817,00	0,00 0,00	649.365.373,00 566.901.817,00	(82.463.556,00)	87,30	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 50	Rehab Gedung UKS	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000.000,00 99.627.000,00	100.000.000,00 99.627.000,00	(373.000,00)	99,63	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	0,00 0,00	320.000.000,00 319.963.071,00	0,00 0,00	320.000.000,00 319.963.071,00	(36.929,00)	99,99	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01.1.01.01.18.14	Operasional Kelompok Bermain Binaan SPNF SKB	0,00	47.000.000,00	3.000.000,00	50.000.000,00	(43.230,00)	99,91	
		0,00	46.957.070,00	2.999.700,00	49.956.770,00			
1.01.1.01.01.18.15	Fasilitasi Pameran HAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.18.16	Pelatihan Keterampilan Anak Putus Sekolah (PKH)	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.18.18	Operasional Pengelolaan SPNF SKB	0,00	77.797.000,00	0,00	77.797.000,00	(14.766.501,00)	81,02	
		0,00	63.030.499,00	0,00	63.030.499,00			
1.01.1.01.01.18.19	Operasional PBM Paket A, B dan C	0,00	295.200.000,00	0,00	295.200.000,00	(55.558.300,00)	81,18	
		0,00	239.641.700,00	0,00	239.641.700,00			
1.01.1.01.01.18.20	Pelaksanaan UNBK dan Ujian Semester Paket A, B dan C	0,00	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00	0,00	100,00	
		0,00	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00			
1.01.1.01.01.18.21	Fasilitasi Pameran Keterampilan Binaan PNF	0,00	27.660.000,00	0,00	27.660.000,00	(27.660.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.18.22	Operasional Keaksaraan Fungsional	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.18.26	Pengadaan Sound System SKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.18.31	Belanja DAK Sanggar Kegiatan Belajar	0,00	0,00	1.062.957.000,00	1.062.957.000,00	(98.226.300,00)	90,76	
		0,00	0,00	964.730.700,00	964.730.700,00			
1.01.1.01.01.20	<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	0,00	1.020.334.449,00	0,00	1.020.334.449,00	(220.267.699,00)	78,41	
		0,00	800.066.750,00	0,00	800.066.750,00			
1.01.1.01.01.20.13	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	0,00	20.957.497,00	0,00	20.957.497,00	0,00	100,00	
		0,00	20.957.497,00	0,00	20.957.497,00			
1.01.1.01.01.20.16	Jambore PAUD	0,00	13.380.000,00	0,00	13.380.000,00	(13.380.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.20.17	Porseni Guru dan Murid TK	0,00	37.390.850,00	0,00	37.390.850,00	0,00	100,00	
		0,00	37.390.850,00	0,00	37.390.850,00			
1.01.1.01.01.20.18	Operasional Ikatan Guru TK	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	(11.124.568,00)	60,55	
		0,00	17.075.432,00	0,00	17.075.432,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19	Facilitasi TPK TK	0,00	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00	0,00	100,00	
		0,00	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20	Facilitasi Pelaksanaan UKG dan PKG Bagi Guru TK	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	(10.700.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21	Workshop Pengembangan PTK PAUD	0,00	64.116.750,00	0,00	64.116.750,00	0,00	100,00	
		0,00	64.116.750,00	0,00	64.116.750,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 23	Pelatihan Manajemen Kepala TK/RA	0,00	30.602.000,00	0,00	30.602.000,00	(3.629.500,00)	88,14	
		0,00	26.972.500,00	0,00	26.972.500,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 24	WorkShop Pembuatan Perangkat Pembelajaran di PAUD	0,00	28.106.000,00	0,00	28.106.000,00	(9.576.000,00)	65,93	
		0,00	18.530.000,00	0,00	18.530.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 25	Workshop Cipta Lagu dan Cipta Tari Bagi Guru PAUD	0,00	38.412.847,00	0,00	38.412.847,00	0,00	100,00	
		0,00	38.412.847,00	0,00	38.412.847,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 26	Workshop Pembuatan Alat Peraga PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 27	Sosialisasi dan Verifikasi Sertifikasi Guru	0,00	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	100,00	
		0,00	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 28	Operasional Penilaian Angka Kredit	0,00	64.602.500,00	0,00	64.602.500,00	(1.334.871,00)	97,93	
		0,00	63.267.629,00	0,00	63.267.629,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 30	Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi	0,00	65.650.100,00	0,00	65.650.100,00	(4.162.800,00)	93,66	
		0,00	61.487.300,00	0,00	61.487.300,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 31	Seleksi Kepala Sekolah	0,00	142.490.000,00	0,00	142.490.000,00	(29.603.760,00)	79,22	
		0,00	112.886.240,00	0,00	112.886.240,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 33	Pemberian Reward Pembimbing dan Siswa Pemenang Lomba Akademik dan Non Akademik Tingkat Provinsi	0,00	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	(25.850.000,00)	63,12	
		0,00	44.250.000,00	0,00	44.250.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 37	Pelatihan dan Disain Media Pembelajaran Bagi Guru SD	0,00	30.219.138,00	0,00	30.219.138,00	0,00	100,00	
		0,00	30.219.138,00	0,00	30.219.138,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 39	Olimpiade guru	0,00	120.797.725,00	0,00	120.797.725,00	0,00	100,00	
		0,00	120.797.725,00	0,00	120.797.725,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 40	Magang Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 42	Pelatihan guru mata pelajaran yang di UN kan	0,00	102.929.650,00	0,00	102.929.650,00	0,00	100,00	
		0,00	102.929.650,00	0,00	102.929.650,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 43	Pelatihan Pengembangan Guru Pembelajaran Pasca UKG	0,00	55.870.000,00	0,00	55.870.000,00	(55.870.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 44	Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru SLTP	0,00	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00	(17.516.200,00)	9,94	
		0,00	1.933.800,00	0,00	1.933.800,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 46	Operasional Forum Ilmiah Guru (FIG)	0,00	24.145.392,00	0,00	24.145.392,00	0,00	100,00	
		0,00	24.145.392,00	0,00	24.145.392,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 49	Pembinaan pengembangan keprofesian berkelanjutan	0,00	37.520.000,00	0,00	37.520.000,00	(37.520.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 50	Program Indonesia Pintar (PIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0,00	6.905.603.094,00	3.354.884.598,00	10.260.487.692,00	(429.584.673,00)	95,81	
		0,00	6.517.222.744,00	3.313.680.275,00	9.830.903.019,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10	Forum OPD Dinas Pendidikan	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	(887.000,00)	83,14	
		0,00	4.373.000,00	0,00	4.373.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11	Penyusunan Renstra 2018 - 2023 Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 12	Penutakhiran Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas Pendidikan	0,00	9.255.000,00	0,00	9.255.000,00	(2.237.000,00)	75,83	
		0,00	7.018.000,00	0,00	7.018.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 14	Pemeriksaan Ujian Standar Kota SD/MI/ SMP/MTs	0,00	36.117.000,00	0,00	36.117.000,00	(6.540.002,00)	81,89	
		0,00	29.576.998,00	0,00	29.576.998,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 15	Operasional dan Pengembangan Information Communication and Technology (ICT) & Mapping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 16	Fasilitasi Pelatihan Operator Dapodik SD dan SMP	0,00	11.763.000,00	0,00	11.763.000,00	(1.044.000,00)	91,12	
		0,00	10.719.000,00	0,00	10.719.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5				
								7
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 17	Operasional KKG TK / Gugus PAUD Non Formal Operasional TBM	0,00	68.750.000,00	0,00	68.750.000,00	(14.045.000,00)	79,57	
		0,00	54.705.000,00	0,00	54.705.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 18		0,00	21.928.000,00	0,00	21.928.000,00	(1.036.000,00)	95,28	
		0,00	20.892.000,00	0,00	20.892.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 19	Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan DAK BOP PAUD Pelatihan Dapodik PAUD	0,00	8.117.500,00	0,00	8.117.500,00	(1.232.000,00)	84,82	
		0,00	6.885.500,00	0,00	6.885.500,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 20		0,00	13.221.500,00	0,00	13.221.500,00	(801.600,00)	93,94	
		0,00	12.419.900,00	0,00	12.419.900,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 21	Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan Dikmas Operasional Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar	0,00	26.237.500,00	0,00	26.237.500,00	(14.290.500,00)	45,53	
		0,00	11.947.000,00	0,00	11.947.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 22		0,00	48.019.800,00	0,00	48.019.800,00	(10.001.640,00)	79,17	
		0,00	38.018.160,00	0,00	38.018.160,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 23	Akreditasi Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 24	Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Evaluasi Diri Sekolah (EDS)	0,00	8.529.000,00	0,00	8.529.000,00	(5.820,00)	99,93	
		0,00	8.523.180,00	0,00	8.523.180,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 26	Operasional SMP Negeri 1 Sawahlunto Operasional SMP Negeri 2 Sawahlunto	0,00	52.237.500,00	0,00	52.237.500,00	(3.604.906,00)	93,10	
		0,00	48.632.594,00	0,00	48.632.594,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 27		0,00	177.312.000,00	180.688.000,00	358.000.000,00	(17.825.045,00)	95,02	
		0,00	159.528.555,00	180.646.400,00	340.174.955,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 28	Operasional SMP Negeri 3 Sawahlunto Operasional SMP Negeri 4 Sawahlunto	0,00	52.950.800,00	0,00	52.950.800,00	(4.316.430,00)	91,85	
		0,00	48.634.370,00	0,00	48.634.370,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 29		0,00	36.425.000,00	0,00	36.425.000,00	(2.277.150,00)	93,75	
		0,00	34.147.850,00	0,00	34.147.850,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 30	Operasional SMP Negeri 5 Sawahlunto Operasional SMP Negeri 6 Sawahlunto	0,00	46.425.000,00	0,00	46.425.000,00	(1.609.135,00)	96,53	
		0,00	44.815.865,00	0,00	44.815.865,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 31		0,00	39.750.000,00	0,00	39.750.000,00	(3.507.785,00)	91,18	
		0,00	36.242.215,00	0,00	36.242.215,00			

AMPILIRAN 1.3 PERIODA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 7

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 32	Operasional SMP Negeri 7 Sawahlunto	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	(1.725.461,00)	95,14	
		0,00	33.774.539,00	0,00	33.774.539,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 33	Operasional SMP Negeri 8 Sawahlunto	0,00	35.750.000,00	0,00	35.750.000,00	(1.567.250,00)	95,62	
		0,00	34.182.750,00	0,00	34.182.750,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 34	Operasional SMP Negeri 9 Sawahlunto	0,00	35.150.000,00	0,00	35.150.000,00	(1.070.695,00)	96,95	
		0,00	34.079.305,00	0,00	34.079.305,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 35	Pelatihan Asesor bagi Guru-Guru SLS dan Guru Sekolah Inklus (menjadi Asesor)	0,00	65.400.000,00	0,00	65.400.000,00	(65.400.000,00)	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 37	Pendidikan Digital untuk Sekolah Dasar dan Menengah	0,00	29.769.485,00	255.426.400,00	285.195.885,00	0,00	100,00	
		0,00	29.769.485,00	255.426.400,00	285.195.885,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 51	Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri	0,00	4.068.080.995,00	1.937.496.203,00	6.005.577.198,00	(134.279.167,00)	97,76	
		0,00	3.945.864.856,00	1.925.433.175,00	5.871.298.031,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 52	Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri	0,00	1.973.654.014,00	981.273.995,00	2.954.928.009,00	(140.281.087,00)	95,25	
		0,00	1.862.472.622,00	952.174.300,00	2.814.646.922,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	0,00	382.146.049,00	0,00	382.146.049,00	(7.776.643,00)	97,97	
		0,00	374.369.406,00	0,00	374.369.406,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 01	Pelaksanaan Kegiatan Pra UN SMP/MTs dan Pra UNAS SD/MI (Ujian Nasional) SD/MI	0,00	51.630.000,00	0,00	51.630.000,00	(2,00)	100,00	
		0,00	51.629.998,00	0,00	51.629.998,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 02	Pelaksanaan Ujian Nasional dan UAS SMP/MTs dan UAS SD/MI	0,00	61.720.308,00	0,00	61.720.308,00	0,00	100,00	
		0,00	61.720.308,00	0,00	61.720.308,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 03	Pelaksanaan Ujian Standar Kota SD/MI dan SMP/MTs	0,00	268.795.741,00	0,00	268.795.741,00	(7.776.641,00)	97,11	
		0,00	261.019.100,00	0,00	261.019.100,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	0,00	1.373.015.620,00	8.795.549.500,00	10.168.565.120,00	(2.511.073.120,00)	75,31	
		0,00	1.308.129.860,00	6.349.362.140,00	7.657.492.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01	Belanja DAK Fisik Tingkat SD	0,00	0,00	4.073.885.000,00	4.073.885.000,00	(1.703.407.296,00)	58,19	
		0,00	0,00	2.370.477.704,00	2.370.477.704,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02	Belanja DAK Fisik Tingkat SMP	0,00	0,00	1.827.070.000,00	1.827.070.000,00	(68.086.591,00)	96,27	
		0,00	0,00	1.758.983.409,00	1.758.983.409,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			Jumlah	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03	Pengadaan Komputer untuk SD se Kota Sawahlunto	0,00	0,00	818.285.200,00	818.285.200,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	818.285.200,00	818.285.200,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05	Pengadaan Meja dan Kursi Siswa	0,00	0,00	99.484.200,00	99.484.200,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	99.484.200,00	99.484.200,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10	Pengadaan Drum bend untuk SD 06 Bukit Gadang, SD 13 Sungai Durian dan SD 05 Kubang Sirakuk Bawah	0,00	0,00	168.161.700,00	168.161.700,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	168.161.700,00	168.161.700,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12	Pemasangan Akses/jaringan Internet SMPN 4, SMPN 8 dan SMPN 9 Kota Sawahlunto	0,00	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20	Pengadaan Drumbend SMPN 7 Sawahlunto	0,00	0,00	74.200.900,00	74.200.900,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	74.200.900,00	74.200.900,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38	Pembangunan / Rehabilitasi SD Muhammadiyah Silungkang	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	(2.965.000,00)	98,52	
		0,00	197.035.000,00	0,00	197.035.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39	Pengadaan Al Quran untuk SLTP dan SLTA Se Kota Sawahlunto	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(120.909.498,00)	59,70	
		0,00	0,00	179.090.502,00	179.090.502,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40	Pembuatan pagar sekolah SMP Muhammadiyah Silungkang	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	(2.985.000,00)	98,51	
		0,00	197.015.000,00	0,00	197.015.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 42	Pemasangan Pavling blok halaman Upacara SD 1 Talawi	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	(2.483.300,00)	97,52	
		0,00	0,00	97.516.700,00	97.516.700,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 43	Rehap rumah Pegawai Sekolah SD 1 Talawi	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	(1.680.000,00)	97,42	
		0,00	0,00	63.320.000,00	63.320.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 44	Pengadaan Sarana Pendidikan bagi Siswa Baru SD dan SMP	0,00	973.015.620,00	0,00	973.015.620,00	(58.935.760,00)	93,94	
		0,00	914.079.860,00	0,00	914.079.860,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 46	Pengadaan Drumbend Untuk SD 7 Talawi	0,00	0,00	69.562.500,00	69.562.500,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	69.562.500,00	69.562.500,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 47	Rehab Pagar, DAM, Gapura dan Cor Halaman SDN 14 Kumbayau	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	(54.908.500,00)	87,80	
		0,00	0,00	395.091.500,00	395.091.500,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 56	Pengadaan Meja Kursi SMPN 2 dan SMPN 7 Sawahlunto	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	(92.175,00)	99,94	
		0,00	0,00	149.907.825,00	149.907.825,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		Jumlah	(Rp)	(%)	
			BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 58	Pembangunan Kantor ULP Pendidikan Kecamatan Barangin	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	(494.620.000,00)	1,08	
		0,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25	Program Peningkatan Kompetensi dan Kreatifitas Siswa	0,00	2.077.002.320,00	0,00	2.077.002.320,00	(288.702.000,00)	86,10	
		0,00	1.788.300.320,00	0,00	1.788.300.320,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 01	Pelatihan Center MIPA Tingkat SD	0,00	7.904.820,00	0,00	7.904.820,00	0,00	100,00	
		0,00	7.904.820,00	0,00	7.904.820,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 02	Lomba Pidato Berbahasa Indonesia SMP/MTs, Lomba Mengarang dan Bercerita SD/MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 03	Pelaksanaan Olimpiade dan Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD / SMP	0,00	79.276.000,00	0,00	79.276.000,00	(43.805.000,00)	44,74	
		0,00	35.471.000,00	0,00	35.471.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 05	Lomba Kreatifitas Seni Siswa (FLS2N) SD/SMP	0,00	295.950.000,00	0,00	295.950.000,00	(93.159.000,00)	68,52	
		0,00	202.791.000,00	0,00	202.791.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 08	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP	0,00	193.871.500,00	0,00	193.871.500,00	(738.000,00)	99,62	
		0,00	193.133.500,00	0,00	193.133.500,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 11	Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 14	Peningkatan Kompetensi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	(151.000.000,00)	89,93	
		0,00	1.349.000.000,00	0,00	1.349.000.000,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Program Pendidikan Berkarakter	0,00	123.600.000,00	0,00	123.600.000,00	(2.622.100,00)	97,88	
		0,00	120.977.900,00	0,00	120.977.900,00			
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 01	Pelatihan pendidikan berkarakter SD/SLTP	0,00	123.600.000,00	0,00	123.600.000,00	(2.622.100,00)	97,88	
		0,00	120.977.900,00	0,00	120.977.900,00			
1.02	Kesehatan	0,00	95.930.000,00	0,00	95.930.000,00	(10.905.940,00)	88,63	
		0,00	85.024.060,00	0,00	85.024.060,00			
1.02 . 1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	95.930.000,00	0,00	95.930.000,00	(10.905.940,00)	88,63	
		0,00	85.024.060,00	0,00	85.024.060,00			
1.02 . 1.01.01 . 01	Dinas Pendidikan	0,00	95.930.000,00	0,00	95.930.000,00	(10.905.940,00)	88,63	
		0,00	85.024.060,00	0,00	85.024.060,00			

LAMPIRAN 1.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 10

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02 . 1.01.01 . 01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	95.930.000,00	0,00	95.930.000,00	(10.905.940,00)	88,63	
		0,00	85.024.060,00	0,00	85.024.060,00			
		0,00	95.930.000,00	0,00	95.930.000,00	(10.905.940,00)	88,63	
		0,00	85.024.060,00	0,00	85.024.060,00			
1.02 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06	Pelaksanaan Penilaian UKS Dan Lomba Sekolah Sehat	0,00						
	JUMLAH	0,00	22.560.554.715,00	13.497.221.098,00	36.057.775.813,00	(4.667.219.322,00)	87,06	
		0,00	20.481.680.676,00	10.908.875.815,00	31.390.556.491,00			

Sawahlunto, 27 Januari 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
		3	4	5	6		
1	2						
05	05	Lingkungan Hidup	3.351.719.221,00	1.979.130.728,00	(1.372.588.493,00)	59,05	
06	03 04	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	111.198.394.610,00	96.410.666.782,00	(14.787.727.828,00)	86,70	
06			1	75.232.043.240,00	65.040.575.051,00	(10.191.468.189,00)	86,45
06			1	35.966.351.370,00	31.370.091.731,00	(4.596.259.639,00)	87,22
07	02 08	KESEHATAN Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132.294.665.807,00	115.990.918.885,00	(16.303.746.922,00)	87,68	
07			1	130.554.438.657,00	114.609.299.530,00	(15.945.139.127,00)	87,79
07			2	1.740.227.150,00	1.381.619.355,00	(358.607.795,00)	79,39
08	16 02	PARIWISATA DAN BUDAYA Kebudayaan Parwisata	20.922.143.801,00	18.686.487.493,00	(2.235.656.308,00)	89,31	
08			2	9.451.884.745,00	8.359.391.755,00	(1.092.492.990,00)	88,44
08			3	11.470.259.056,00	10.327.095.738,00	(1.143.163.318,00)	90,03
10	01 13 17	PENDIDIKAN Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Perustakaan	136.994.619.176,00	127.875.874.234,00	(9.118.744.942,00)	93,34	
10			1	130.593.734.257,00	122.285.067.599,00	(8.308.666.658,00)	93,64
10			2	2.172.291.000,00	1.639.359.113,00	(532.931.887,00)	75,47
10	2		4.228.593.919,00	3.951.447.522,00	(277.146.397,00)	93,45	
11	06	PERLINDUNGAN SOSIAL Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan dan Capii	11.858.124.185,00	10.989.104.629,00	(869.019.556,00)	92,67	
11			1	6.372.538.161,00	5.878.689.788,00	(493.848.373,00)	92,25
11			2	1.204.545.400,00	1.139.186.509,00	(65.358.891,00)	94,57
11	2		4.281.040.624,00	3.971.228.332,00	(309.812.292,00)	92,76	
11	06						
JUMLAH			699.091.718.540,00	622.472.823.122,01	(76.618.895.417,99)	89,04	

Sawahlunto, 27 Januari 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

3.1.5 Indikator Kinerja

Persentase capaian realisasi belanja bidang kesehatan.

Persentase capaian realisasi anggaran

Indikator kinerja anggaran	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi anggaran	9,60	10%	9,79%	98%	10%	98%

$$= \frac{\text{Realisasi BM Kesehatan}}{\text{Realisasi Belanja Kesehatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{11.351.248.882}{115.990.918.885} \times 100 \%$$

$$= 9,79 \%$$

Data Dukung :

No	Uraian	Realisasi anggaran
1.	Belanja Modal Bidang Kesehatan dengan rincian sebagaimana terlampir	11.351.248.882
2.	Realisasi Belanja Kesehatan :	115.990.918.885
	- Kesehatan	114.609.299.530
	- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.381.619.355

3.2 Sasaran Strategis

Mengelola Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja :

Persentase capaian realisasi pendapatan (fiscal space)



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran I.3 PERDA PERTANGGUNG
JAWABAN : TAHUN 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02
Unit Organisasi : 1.02.01
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	7
			BARANG & JASA	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0,00	29.785.852.791,00	11.351.248.882,00	41.137.101.673,00	(11.294.375.474,00)	72,54	
		0,00	25.124.371.604,00	4.718.354.595,00	29.842.726.199,00			
1.02	Kesehatan	0,00	29.785.852.791,00	11.351.248.882,00	41.137.101.673,00	(11.294.375.474,00)	72,54	
		0,00	25.124.371.604,00	4.718.354.595,00	29.842.726.199,00			
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	29.785.852.791,00	11.351.248.882,00	41.137.101.673,00	(11.294.375.474,00)	72,54	
		0,00	25.124.371.604,00	4.718.354.595,00	29.842.726.199,00			
1.02.1.02.01.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	29.785.852.791,00	11.351.248.882,00	41.137.101.673,00	(11.294.375.474,00)	72,54	
		0,00	25.124.371.604,00	4.718.354.595,00	29.842.726.199,00			
1.02.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00	3.621.072.500,00	0,00	3.621.072.500,00	(1.038.504.367,00)	71,32	
		0,00	2.582.568.133,00	0,00	2.582.568.133,00			
		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	(35.000,00)	97,67	
1.02.1.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00			
		0,00	171.600.000,00	0,00	171.600.000,00	(23.778.235,00)	86,14	
1.02.1.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	147.821.765,00	0,00	147.821.765,00			
		0,00	16.327.000,00	0,00	16.327.000,00	(510.000,00)	96,88	
1.02.1.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	15.817.000,00	0,00	15.817.000,00			
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(74.500,00)	99,75	
1.02.1.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	29.925.500,00	0,00	29.925.500,00			
		0,00	47.470.000,00	0,00	47.470.000,00	(77.000,00)	99,84	
1.02.1.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	0,00	47.393.000,00	0,00	47.393.000,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI 3	JENIS BELANJA BARANG & JASA 4	MODAL 5	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp) 7	(%) 8	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02.1.02.01.01.02.52	Pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan/sarana penunjang/gedung kantor dan rumah dinas	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(2.204.000,00)	99,27	
1.02.1.02.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	0,00	297.796.000,00	297.796.000,00			
1.02.1.02.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	62.770.152,00	0,00	62.770.152,00	(49.229.848,00)	56,04	
1.02.1.02.01.01.05.13	Pertemuan Tim Penilai Kredit Poin dan Tenaga Fungsional Tertentu	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(44.229.848,00)	55,77	
1.02.1.02.01.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	0,00	55.770.152,00	0,00	55.770.152,00			
1.02.1.02.01.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	58,33	
1.02.1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.16.03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	(19.399.064,00)	92,24	
1.02.1.02.01.01.16.04	Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Sunbar sakato (JKSS/JAMKESDA)	0,00	230.600.936,00	0,00	230.600.936,00	(19.399.064,00)	92,24	
1.02.1.02.01.01.16.05	Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Sawahlunto	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	(19.399.064,00)	92,24	
1.02.1.02.01.01.16.06	Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan	0,00	230.600.936,00	0,00	230.600.936,00	(19.399.064,00)	92,24	
1.02.1.02.01.01.16.07	Pelatihan Penanggulangan Kegawatdaruratan Bagi Tenaga Kesehatan	0,00	19.729.702.695,00	822.760.000,00	20.552.462.695,00	(2.399.532.823,00)	88,32	
1.02.1.02.01.01.16.08	Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (UNITT)	0,00	17.676.542.637,00	476.387.235,00	18.152.929.872,00	(2.399.532.823,00)	88,32	
1.02.1.02.01.01.16.10	Penunjang Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(12.662.000,00)	36,69	
		0,00	7.338.000,00	0,00	7.338.000,00	(16.986.400,00)	99,58	
		0,00	4.089.932.000,00	0,00	4.089.932.000,00	(16.986.400,00)	99,58	
		0,00	4.072.945.600,00	0,00	4.072.945.600,00	(545.022.124,00)	92,85	
		0,00	7.618.519.000,00	0,00	7.618.519.000,00	(545.022.124,00)	92,85	
		0,00	7.073.496.876,00	0,00	7.073.496.876,00	(2.000.000,00)	87,44	
		0,00	15.922.600,00	0,00	15.922.600,00	(2.000.000,00)	87,44	
		0,00	13.922.600,00	0,00	13.922.600,00	(5.850.000,00)	80,50	
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(5.850.000,00)	80,50	
		0,00	24.150.000,00	0,00	24.150.000,00	(4.184.600,00)	77,49	
		0,00	18.590.000,00	0,00	18.590.000,00	(4.184.600,00)	77,49	
		0,00	14.405.400,00	0,00	14.405.400,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02.1.02.01.01.16.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan/BOK (DAK NON FISIK)	0,00	3.911.458.000,00	0,00	3.911.458.000,00	(321.439.078,00)	91,78	
		0,00	3.590.018.922,00	0,00	3.590.018.922,00			
		0,00	9.446.300,00	0,00	9.446.300,00	(900.000,00)	90,47	
1.02.1.02.01.01.16.13	Pelayanan Kesehatan Hari Libur Lebaran	0,00	8.546.300,00	0,00	8.546.300,00			
		0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(96.525,00)	99,46	
1.02.1.02.01.01.16.14	Pelayanan Kesehatan Event Nasional	0,00	17.903.475,00	0,00	17.903.475,00			
		0,00	1.355.869.680,00	213.000.000,00	1.568.869.680,00	(603.866.888,00)	61,51	
1.02.1.02.01.01.16.15	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Talawi	0,00	841.561.792,00	123.441.000,00	965.002.792,00			
		0,00	665.981.175,00	147.000.000,00	812.981.175,00	(184.940.807,00)	77,25	
1.02.1.02.01.01.16.16	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Silungkang	0,00	531.818.033,00	96.222.335,00	628.040.368,00			
		0,00	434.074.728,00	23.760.000,00	457.834.728,00	(55.872.436,00)	87,80	
1.02.1.02.01.01.16.17	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kolok	0,00	378.202.292,00	23.760.000,00	401.962.292,00			
		0,00	696.894.156,00	210.600.000,00	907.494.156,00	(308.757.776,00)	65,98	
1.02.1.02.01.01.16.18	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Sungai Durian	0,00	479.042.380,00	119.694.000,00	598.736.380,00			
		0,00	487.981.152,00	168.500.000,00	656.481.152,00	(251.185.985,00)	61,74	
1.02.1.02.01.01.16.19	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kampung Teleng	0,00	335.475.267,00	69.819.900,00	405.295.167,00			
		0,00	347.114.729,00	59.900.000,00	407.014.729,00	(83.174.379,00)	79,56	
1.02.1.02.01.01.16.20	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Lunto	0,00	280.390.350,00	43.450.000,00	323.840.350,00			
		0,00	9.919.175,00	0,00	9.919.175,00	(2.593.825,00)	73,85	
1.02.1.02.01.01.16.21	Monitoring Garam Beryodium Tingkat Pasar dan Desa/kelurahan	0,00	7.325.350,00	0,00	7.325.350,00			
		0,00	33.780.000,00	0,00	33.780.000,00	(697.800,00)	97,93	
1.02.1.02.01.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	33.082.200,00	0,00	33.082.200,00			
		0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	(351.500,00)	98,40	
1.02.1.02.01.01.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	0,00	21.648.500,00	0,00	21.648.500,00			
		0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(17.800,00)	99,76	
1.02.1.02.01.01.17.06	Bimtek Penggunaan Obat yang Rasional	0,00	7.482.200,00	0,00	7.482.200,00			
		0,00	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	(328.500,00)	92,32	
1.02.1.02.01.01.17.07	Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman	0,00	3.951.500,00	0,00	3.951.500,00			
		0,00	367.583.000,00	0,00	367.583.000,00	(56.268.100,00)	84,69	
1.02.1.02.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	0,00	311.314.900,00	0,00	311.314.900,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH	(Rp)	(%)	
			BARANG & JASA	MODAL				
								3
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02.1.02.01.01.19.07	Facilitasi Perkenahan Saka Bakti Husada Tingkat Provinsi Sumbang dan Nasional	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	(2.291.800,00)	96,73	
1.02.1.02.01.01.19.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Media Promosi Sarana Hidup Sehat	0,00	67.708.200,00	0,00	67.708.200,00	(8.477.000,00)	83,05	
1.02.1.02.01.01.19.09	Orientasi Krida dan Perkenahan Bakti Saka Bakti Husada	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(872.500,00)	98,26	
1.02.1.02.01.01.19.14	Pelaksanaan Teknis Program Desa/Kelurahan Siaga Aktif	0,00	41.523.000,00	0,00	41.523.000,00	(8.016.200,00)	78,33	
1.02.1.02.01.01.19.19	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	0,00	50.000.000,00	0,00	49.127.500,00	(8.016.200,00)	78,33	
1.02.1.02.01.01.19.19	Posyandu Award	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	(8.016.200,00)	78,33	
1.02.1.02.01.01.19.20	Posyandu Award	0,00	28.983.800,00	0,00	28.983.800,00	(4.715.600,00)	85,53	
1.02.1.02.01.01.19.20	Posyandu Award	0,00	32.583.000,00	0,00	32.583.000,00	(4.715.600,00)	85,53	
1.02.1.02.01.01.19.21	Facilitasi Indikator Posyandu Pada KKG PKK KB Kesehatan Tahun 2018	0,00	27.867.400,00	0,00	27.867.400,00	(266.000,00)	99,11	
1.02.1.02.01.01.19.22	Penjaringan Kesehatan (skrining) bagi Murid Baru SD-SLTA	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(266.000,00)	99,11	
1.02.1.02.01.01.19.22	Penjaringan Kesehatan (skrining) bagi Murid Baru SD-SLTA	0,00	29.734.000,00	0,00	29.734.000,00	(30.920.300,00)	45,75	
1.02.1.02.01.01.19.24	Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	(30.920.300,00)	45,75	
1.02.1.02.01.01.19.24	Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	0,00	26.079.700,00	0,00	26.079.700,00	(12.500,00)	99,92	
1.02.1.02.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(12.500,00)	99,92	
1.02.1.02.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	0,00	14.987.500,00	0,00	14.987.500,00	(696.200,00)	97,32	
1.02.1.02.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	(696.200,00)	97,32	
1.02.1.02.01.01.20.07	Penatalaksanaan Ibu Hamil KEK dan Balita KEP	0,00	25.303.800,00	0,00	25.303.800,00	(2.328.250,00)	66,74	
1.02.1.02.01.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	(2.328.250,00)	66,74	
1.02.1.02.01.01.21.07	Penyelenggaraan Kegiatan STBM	0,00	4.671.750,00	0,00	4.671.750,00	(2.328.250,00)	66,74	
1.02.1.02.01.01.21.08	Penyehatan Tempat-tempat Umum	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	(26.926.823,00)	82,12	
1.02.1.02.01.01.21.09	Operasional Forum Kota Sehat	0,00	4.671.750,00	0,00	4.671.750,00	(26.926.823,00)	82,12	
		0,00	150.592.000,00	0,00	150.592.000,00	0,00	0,00	
		0,00	123.665.177,00	0,00	123.665.177,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	(36.450,00)	99,39	
		0,00	5.923.550,00	0,00	5.923.550,00	(36.450,00)	99,39	
		0,00	94.640.000,00	0,00	94.640.000,00	(14.895.998,00)	84,26	
		0,00	79.744.002,00	0,00	79.744.002,00	(14.895.998,00)	84,26	

Halaman 5

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)	
								7
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1.02.1.02.01.01.21.10	Pemeriksaan rumah dan sarana sanitasi	0,00	49.992.000,00	0,00	49.992.000,00	(11.994.375,00)	76,01	
		0,00	37.997.625,00	0,00	37.997.625,00			
1.02.1.02.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	0,00	277.944.500,00	0,00	277.944.500,00	(72.599.200,00)	73,88	
		0,00	205.345.300,00	0,00	205.345.300,00			
1.02.1.02.01.01.22.01	Pengendalian TB	0,00	69.970.000,00	0,00	69.970.000,00	(11.861.500,00)	83,05	
		0,00	58.108.500,00	0,00	58.108.500,00			
1.02.1.02.01.01.22.02	Pengendalian Penyakit Kusta	0,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	(5.652.500,00)	40,81	
		0,00	3.897.500,00	0,00	3.897.500,00			
1.02.1.02.01.01.22.03	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan Vektor	0,00	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00	(14.131.300,00)	75,84	
		0,00	44.368.700,00	0,00	44.368.700,00			
1.02.1.02.01.01.22.04	Fasilitasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA)	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	(16.101.775,00)	52,64	
		0,00	17.898.225,00	0,00	17.898.225,00			
1.02.1.02.01.01.22.05	Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	0,00	63.174.500,00	0,00	63.174.500,00	(15.418.375,00)	75,59	
		0,00	47.756.125,00	0,00	47.756.125,00			
1.02.1.02.01.01.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	(6.249.750,00)	80,47	
		0,00	25.750.250,00	0,00	25.750.250,00			
1.02.1.02.01.01.22.12	Sosialisasi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	0,00	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	(3.184.000,00)	70,38	
		0,00	7.566.000,00	0,00	7.566.000,00			
1.02.1.02.01.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	0,00	624.080.000,00	0,00	624.080.000,00	(221.652.755,00)	64,48	
		0,00	402.427.245,00	0,00	402.427.245,00			
1.02.1.02.01.01.23.09	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	0,00	624.080.000,00	0,00	624.080.000,00	(221.652.755,00)	64,48	
		0,00	402.427.245,00	0,00	402.427.245,00			
1.02.1.02.01.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	0,00	1.817.188.118,00	10.017.097.882,00	11.834.286.000,00	(6.475.863.474,00)	45,28	
		0,00	1.618.408.166,00	3.740.014.360,00	5.358.422.526,00			
1.02.1.02.01.01.25.24	Pengadaan alat kedokteran/Kesehatan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	(8.078.630,00)	95,96	
		0,00	0,00	191.921.370,00	191.921.370,00			
1.02.1.02.01.01.25.25	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kedokteran/Kesehatan	0,00	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	(3.964.850,00)	97,16	
		0,00	135.535.150,00	0,00	135.535.150,00			

Halaman 6

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI 3	JENIS BELANJA BARANG & JASA 4	MODAL 5	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp) 7	(%) 8	
1								
1.02.1.02.01.01.25.26	Pengadaan sarana Dan Prasarana Penunjang Keluarga Berencana (DAK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB)	0,00	780.000.000,00	289.237.000,00	1.069.237.000,00	(157.487.200,00)	85,27	
		0,00	674.059.600,00	237.690.200,00	911.749.800,00			
1.02.1.02.01.01.25.28	DAK Murni Pendamping dan Operasional	0,00	897.688.118,00	9.527.860.882,00	10.425.549.000,00	(6.306.332.794,00)	39,51	
		0,00	808.813.416,00	3.310.402.790,00	4.119.216.206,00			
1.02.1.02.01.01.28	<i>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</i>	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	(16.200.000,00)	53,71	
		0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.28.06	kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	(16.200.000,00)	53,71	
1.02.1.02.01.01.29	<i>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</i>	0,00	247.000.000,00	0,00	247.000.000,00	(79.832.225,00)	67,68	
		0,00	167.167.775,00	0,00	167.167.775,00			
1.02.1.02.01.01.29.08	Pelatihan Dokter Kecil dan KKR	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	(11.567.725,00)	83,47	
		0,00	58.432.275,00	0,00	58.432.275,00			
1.02.1.02.01.01.29.09	Rehabilitasi Medik Berbasis Masyarakat untuk Anak CP dan ABK	0,00	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00	(68.264.500,00)	61,43	
		0,00	108.735.500,00	0,00	108.735.500,00			
1.02.1.02.01.01.30	<i>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</i>	0,00	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	(3.930.625,00)	80,49	
		0,00	16.219.375,00	0,00	16.219.375,00			
1.02.1.02.01.01.30.08	Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia	0,00	20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	(3.930.625,00)	80,49	
		0,00	16.219.375,00	0,00	16.219.375,00			
1.02.1.02.01.01.31	<i>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</i>	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(7.544.000,00)	49,71	
		0,00	7.456.000,00	0,00	7.456.000,00			
1.02.1.02.01.01.31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(7.544.000,00)	49,71	
1.02.1.02.01.01.32	<i>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</i>	0,00	562.207.500,00	0,00	562.207.500,00	(497.153.650,00)	11,57	
		0,00	65.053.850,00	0,00	65.053.850,00			
1.02.1.02.01.01.32.04	Penatalaksanaan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Ibu dan Anak	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	(19.000,00)	99,53	
		0,00	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00			
1.02.1.02.01.01.32.05	Review Maternal dan Perinatal (RMP)	0,00	8.297.500,00	0,00	8.297.500,00	(1.440.500,00)	82,64	
		0,00	6.857.000,00	0,00	6.857.000,00			

Halaman 7

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)	8
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5				
1.02.1.02.01.01.32.06	Skrining Hipotroid Kongenital (SHK)	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	(11.666.100,00)	80,23	
1.02.1.02.01.01.32.07	Fasilitasi Pelatihan APN bagi Bidan dan Dokter	0,00	47.333.900,00	0,00	47.333.900,00		0,00	
1.02.1.02.01.01.32.09	Pertemuan Koordinasi Program Kesga dan Gizi	0,00	6.910.000,00	0,00	6.910.000,00	(28.050,00)	99,59	
1.02.1.02.01.01.32.10	Bantuan Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK NON FISIK)	0,00	6.881.950,00	0,00	6.881.950,00		0,00	
1.02.1.02.01.01.35	Program Kesehatan Kerja	0,00	484.000.000,00	0,00	484.000.000,00	(484.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.01.01.35.01	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	(67.700,00)	99,34	
1.02.1.02.01.01.36	Program Kesehatan Olahraga	0,00	10.132.300,00	0,00	10.132.300,00	(67.700,00)	99,34	
1.02.1.02.01.01.36.01	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Olahraga	0,00	10.132.300,00	0,00	10.132.300,00		88,12	
1.02.1.02.01.01.38	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	(582.000,00)	62,15	
1.02.1.02.01.01.38.01	Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	0,00	4.318.000,00	0,00	4.318.000,00		86,02	
1.02.1.02.01.01.38.02	Pelatihan Bagi Kader PTM dan Petugas kesehatan Dalam Rangka Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	(27.933.300,00)	86,02	
1.02.1.02.01.01.39	Pelaksanaan kegiatan operasional rutin Sarana Pelayanan Kesehatan	0,00	50.800.000,00	23.000.000,00	73.800.000,00	(6.614.300,00)	19,55	
1.02.1.02.01.01.39.01	Biaya Operasional Rutin Puskesmas Talawi	0,00	22.866.700,00	23.000.000,00	45.866.700,00	(21.319.000,00)	84,95	
1.02.1.02.01.01.39.02	Biaya Operasional Rutin Puskesmas Kolok	0,00	24.300.000,00	23.000.000,00	47.300.000,00	(103.781.945,00)	90,84	
		0,00	17.685.700,00	23.000.000,00	40.685.700,00	(15.073.822,00)	87,63	
		0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	(7.126.190,00)		
		0,00	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00			
		0,00	677.435.978,00	12.000.000,00	689.435.978,00			
		0,00	574.104.033,00	11.550.000,00	585.654.033,00			
		0,00	164.473.408,00	0,00	164.473.408,00			
		0,00	149.399.586,00	0,00	149.399.586,00			
		0,00	57.596.000,00	0,00	57.596.000,00			
		0,00	50.469.810,00	0,00	50.469.810,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)	8
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7		
1.02.1.02.01.01.39.03	Biaya Operasional Rutin Puskesmas Sei Durian	0,00	73.873.686,00	0,00	73.873.686,00	(5.957.477,00)	91,94	
		0,00	67.916.209,00	0,00	67.916.209,00			
1.02.1.02.01.01.39.04	Biaya Operasional Rutin Puskesmas Kp. Teleng	0,00	67.978.306,00	0,00	67.978.306,00	(14.016.334,00)	79,38	
		0,00	53.961.972,00	0,00	53.961.972,00			
1.02.1.02.01.01.39.05	Biaya Operasional Rutin Puskesmas Lunto	0,00	73.221.578,00	0,00	73.221.578,00	(8.932.128,00)	87,80	
		0,00	64.289.450,00	0,00	64.289.450,00			
1.02.1.02.01.01.39.06	Biaya Operasional Rutin Puskesmas Silungkang	0,00	152.293.000,00	0,00	152.293.000,00	(13.720.894,00)	90,99	
		0,00	138.572.106,00	0,00	138.572.106,00			
1.02.1.02.01.01.39.07	Biaya Operasional Rutin Instalasi Farmasi Kota	0,00	88.000.000,00	12.000.000,00	100.000.000,00	(38.955.100,00)	61,04	
		0,00	49.494.900,00	11.550.000,00	61.044.900,00			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	0,00	1.913.827.271,00	0,00	1.913.827.271,00	(376.744.241,00)	80,31	
		0,00	1.537.083.030,00	0,00	1.537.083.030,00			
2.05	Lingkungan Hidup	0,00	134.047.221,00	0,00	134.047.221,00	(14.360.521,00)	89,29	
		0,00	119.686.700,00	0,00	119.686.700,00			
2.05.1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	134.047.221,00	0,00	134.047.221,00	(14.360.521,00)	89,29	
		0,00	119.686.700,00	0,00	119.686.700,00			
2.05.1.02.01.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d	0,00	134.047.221,00	0,00	134.047.221,00	(14.360.521,00)	89,29	
		0,00	119.686.700,00	0,00	119.686.700,00			
2.05.1.02.01.01.27	Program Peningkatan Kualitas Air	0,00	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00	(2.705.000,00)	73,56	
		0,00	7.525.000,00	0,00	7.525.000,00			
2.05.1.02.01.01.27.01	Pembinaan Pengusaha Depot Air Minum	0,00	9.861.221,00	0,00	9.861.221,00	(800.421,00)	91,88	
		0,00	9.060.800,00	0,00	9.060.800,00			
2.05.1.02.01.01.27.02	Pembinaan BPSPAM	0,00	31.756.000,00	0,00	31.756.000,00	(10.328.000,00)	67,48	
		0,00	21.428.000,00	0,00	21.428.000,00			
2.05.1.02.01.01.27.03	Pemeriksaan Kualitas Air Minum	0,00	82.200.000,00	0,00	82.200.000,00	(527.100,00)	99,36	
		0,00	81.672.900,00	0,00	81.672.900,00			
2.05.1.02.01.01.27.04	Pengelolaan Limbah Medis	0,00		0,00				

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					(Rp)	(%)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH				
			BARANG & JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8		
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.740.227.150,00	0,00	1.740.227.150,00	(358.607.795,00)	79,39		
2.08 . 1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.381.619.355,00	0,00	1.381.619.355,00				
2.08 . 1.02.01 . 01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d	0,00	1.740.227.150,00	0,00	1.740.227.150,00	(358.607.795,00)	79,39		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	0,00	164.175.500,00	0,00	164.175.500,00	(18.865.450,00)	88,51		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01	Pembinaan dan Temu Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	0,00	47.960.000,00	0,00	47.960.000,00	(8.131.150,00)	83,05		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03	Pembinaan dan Jambore Saka Kencana	0,00	47.118.000,00	0,00	47.118.000,00	(10.351.500,00)	78,03		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 16 . 04	Pemilihan Duta Genre Tingkat Kota Sawahlunto	0,00	36.766.500,00	0,00	36.766.500,00	(382.800,00)	99,45		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	0,00	375.515.000,00	0,00	375.515.000,00	(38.956.850,00)	89,63		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 18 . 02	Fasilitasi Forum Kader KB	0,00	339.230.000,00	0,00	339.230.000,00	(38.197.350,00)	88,74		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 18 . 03	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	0,00	36.285.000,00	0,00	36.285.000,00	(759.500,00)	97,91		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 18 . 05	Pembentukan Kampung KB	0,00	35.525.500,00	0,00	35.525.500,00				
2.08 . 1.02.01 . 01 . 22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0,00	133.428.650,00	0,00	133.428.650,00	(46.850.200,00)	64,89		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 22 . 02	Fasilitasi Integrasi BKB dengan Posyandu dan PAUD	0,00	86.578.450,00	0,00	86.578.450,00	(46.850.200,00)	64,89		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan KB	0,00	1.067.108.000,00	0,00	1.067.108.000,00	(253.935.295,00)	76,20		
		0,00	813.172.705,00	0,00	813.172.705,00				

LAMPIRAN 1.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Printed By: Siregar

Halaman 10

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN						BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI						(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH				
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01	Pelayanan KB	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	(47.227.635,00)	40,97		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 25 . 02	Jambore/Temu Kreativitas Program KMBPK	0,00	32.772.365,00	0,00	32.772.365,00	(2.685.500,00)	94,63		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 25 . 03	Operasional Balai Penyuluh KB	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(204.022.160,00)	78,23		
2.14	Statistik	0,00	47.314.500,00	0,00	47.314.500,00				
2.14 . 1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	937.108.000,00	0,00	937.108.000,00	(3.775.925,00)	90,45		
2.14 . 1.02.01 . 01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d	0,00	733.085.840,00	0,00	733.085.840,00	(3.775.925,00)	90,45		
2.14 . 1.02.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	0,00	39.552.900,00	0,00	39.552.900,00	(3.775.925,00)	90,45		
2.14 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09	Penyusunan Buku Profil Kesehatan	0,00	35.776.975,00	0,00	35.776.975,00	(3.775.925,00)	90,45		
2.14 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10	Pendataan Keluarga	0,00	35.776.975,00	0,00	35.776.975,00				
JUMLAH		0,00	31.699.680.062,00	11.351.248.882,00	43.050.928.944,00	(11.671.119.715,00)	72,89		
		0,00	26.661.454.634,00	4.718.354.595,00	31.379.809.229,00				

Sawahlunto, 27 Januari 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

KODE		URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)
1			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2			3	4	5	6	
05	2	05	Lingkungan Hidup				
06			3.351.719.221,00	1.979.130.728,00	(1.372.588.493,00)	59,05	
06	1	03	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				
06	1	04	111.198.394.610,00	96.410.666.782,00	(14.787.727.828,00)	86,70	
			75.232.043.240,00	65.040.575.051,00	(10.191.468.189,00)	86,45	
			35.966.351.370,00	31.370.091.731,00	(4.596.259.639,00)	87,22	
07			KESEHATAN				
07	1	02	132.294.665.807,00	115.990.918.885,00	(16.303.746.922,00)	87,68	
07	2	08	130.554.438.657,00	114.609.299.530,00	(15.945.139.127,00)	87,79	
			1.740.227.150,00	1.381.619.355,00	(358.607.795,00)	79,39	
08			PARIWISATA DAN BUDAYA				
08	2	16	20.922.143.801,00	18.686.487.493,00	(2.235.656.308,00)	89,31	
08	3	02	9.451.884.745,00	8.359.391.755,00	(1.092.492.990,00)	88,44	
			11.470.259.056,00	10.327.095.738,00	(1.143.163.318,00)	90,03	
10			PENDIDIKAN				
10	1	01	136.994.619.176,00	127.875.874.234,00	(9.118.744.942,00)	93,34	
10	2	13	130.593.734.257,00	122.285.067.599,00	(8.308.666.658,00)	93,64	
10	2	17	2.172.291.000,00	1.639.359.113,00	(532.931.887,00)	75,47	
			4.228.593.919,00	3.951.447.522,00	(277.146.397,00)	93,45	
11			PERLINDUNGAN SOSIAL				
11	1	06	11.858.124.185,00	10.989.104.629,00	(869.019.556,00)	92,67	
11	2	02	6.372.538.161,00	5.878.689.788,00	(493.848.373,00)	92,25	
11	2	06	1.204.545.400,00	1.139.186.509,00	(65.358.891,00)	94,57	
11	2	06	4.281.040.624,00	3.971.228.332,00	(309.812.292,00)	92,76	
Jumlah			699.091.718.540,00	622.472.823.122,01	(76.618.895.417,99)	89,04	

Sawahlunto, 27 Januari 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

- a. Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan tahun 2019.

Indikator kinerja pendapatan	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi pendapatan	94,36%	100%	95,20%	95,20%	95%	100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100 \\
 &= \frac{639.511.463.488,09}{671.749.080.316,00} \times 100 \% \\
 &= 95,20 \%
 \end{aligned}$$

- b. Perbandingan antara target dan realisasi PBB dan BPHTB tahun 2019.

Indikator kinerja pendapatan	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi PBB dan BPHTB	2,84%	2,5 %	2,39%	96 %	2,5%	96%

Sedangkan untuk PAD adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi (PBB + BPHTB)}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{958.272.261,00 + 407.215.708,00}{57.170.993.865,09} \times 100 \% \\
 &= 2,39 \%
 \end{aligned}$$

Data dukung PBB sudah merupakan rincian dari Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Untuk peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah akan melanjutkan upaya-upaya melalui:

- a. Peningkatan dan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan;
- b. Pemantapan kelembagaan dan optimalisasi pemungutan pendapatan daerah;
- c. Optimalisasi pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah;
- d. Akurasi data terkait dengan dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
- e. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk peningkatan alokasi dana melalui berbagai bentuk program lainnya;
- f. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Dalam menyusun perencanaan di bidang pendapatan daerah didasarkan pada kebijakan umum berikut, yaitu:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- c. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan berupa perluasan objek pendapatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan perlu dijamin agar pungutan tersebut tetap memungkinkan terpeliharanya pertumbuhan perekonomian masyarakat dan kepentingan publik lainnya. Secara intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ada.

1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan;
- b. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

Upaya riil yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto adalah melalui:

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi dengan memberikan pengertian tentang pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/ retribusi sehingga mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak.
- c. Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta

- didepositokan untuk jangka waktu tertentu. Upaya tersebut dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
- d. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target.
 - e. Melakukan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal.

2. Dana Perimbangan

Kebijakan umum dalam perencanaan dana perimbangan didasarkan pada pagu definitif dana perimbangan TA 2019 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan umum dalam perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang dari badan/lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Hibah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah;
- c. Penerimaan hibah yang berupa barang mempertimbangkan nilai manfaatnya sehingga dapat memberi manfaat yang optimal dan tidak membebani belanja daerah di kemudian hari;
- d. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah;

e. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto TA 2019 dilihat dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dapat berjalan dengan relatif baik. Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ditargetkan sebesar Rp 671.749.080.316,00 dapat direalisasikan Rp 639.511.463.488,09 atau 95,20% sedangkan Belanja dari alokasi sebesar Rp 699.091.718.540,00 realisasinya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 622.472.823.122,01 atau 89,04%.

Secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebesar 95,20% sedangkan pada TA 2018 adalah 94,36%. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian Tahun 2018, maka memang mengalami peningkatan.

Meskipun secara umum capaian Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer telah mendekati target yang ditetapkan, namun jika dilihat lebih jauh ada yang tidak terealisasi 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya aturan baru dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Sedangkan untuk capaian kinerja pendapatan Tahun 2019 dimuat pada tabel berikut:

Tabel
Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Sesuai Urutan
Terbesar TA 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	+ / (-) (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	19.316.409.173,00	17.783.593.665,00	(1.532.815.508,00)	92,06
2	Pendapatan Pajak Daerah	5,973,337.400,00	5.502.589.718,00	(470.747.682,00)	92,12
3	Dana Penyesuaian	11.503.247.000,00	0,00	(11.503.247.000,00)	0,00
4	Dana Alokasi Umum	390.050.861.000,00	390.050.861.000,00	0,00	100,00
5	Pendapatan Hibah	10.333.000.000,00	10.343.200.000,00	10.200.000,00	100,10
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.852.616.199,00	10.832.616.199,00	(20.000.000,00)	99,82
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.165.008.336,00	26,451.058.590,00	1.286.050.254,00	105,11
8	Pendapatan retribusi Daerah	4.093.327.838,00	3.624.747.865,00	(468.579.973,00)	88,55
9	Dana Alokasi Khusus	95.091.795.000,00	79.377.889.407,00	(15.713.905.593,00)	83,47
10	Dana Bagi Hasil Pajak	9.825.722.000,00	7.929.496.961,00	(1.896.225.039,00)	80,70
11	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	38.839.386.370,00	37.211.040.083,09	(1.628.346.286,91)	95,81
12	Pendapatan Lainnya	50.704.370.000,00	50.404.370.000,00	(300.000.000,00)	99,41
	Jumlah	671.749.080.316,00	639.511.463.488,09	(32.237.616.827,91)	95,20

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus berupaya melakukan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto, di samping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pendapatan retribusi pada TA 2019 tidak mencapai target 100%. Hal ini dapat dijelaskan karena untuk penerimaan retribusi, akibat tidak tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan pasar karena sedikitnya jumlah kios yang disewa. Ini diakibatkan karena tingginya tarif sewa pasar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat ditambah dengan rendahnya daya beli masyarakat. Begitu juga penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi karena tingginya daya saing daerah wisata tetangga.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan OPD, maka jumlah realisasi pendapatan adalah :

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendapatan OPD
Tahun Anggaran 2019

No	SKPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3.494.469.430,00	3.864.479.454,00	110,59
2	RSUD/ BLUD	29.000.000.000,00	27.047.024.913,00	93,27
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	355.500.000,00	339.711.078,70	95,56
4	Dinas Perhubungan	267.150.000,00	286.579.740,00	107,27
5	Dinas Perumahan, Pemukiman dan LH	468.056.000,00	484.000.045,00	103,41
6	Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil	40.000.000,00	78.400.000,00	196
7	Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan	786.548.000,00	511.933.500,00	65,09
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.000.000,00	105.131.600,00	80,87
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	549.500.000,00	488.125.000,00	88,83
10	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	321.000.000,00	322.327.514,00	100,41
11	P P K D	611.990.412.509,00	582.340.469.623,00	95,16
12	Sekretariat Daerah	126.000.000,00	104.723.100,00	83,11
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.117.044.377,00	23.451.857.420,39	97,24
14	Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Perikanan	103.400.000,00	86.700.500,00	83,85
		671.749.080.316,00	639.511.463.488,09	95,20

Dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

a. Ekstensifikasi penerimaan

Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.

b. Menata proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah.

c. Meningkatkan pengawasan

Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Penyederhaan Mekanisme Penyetoran

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

e. Harmonisasi SKPD yang Berwenang

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh OPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

3.3 Sasaran Strategis

Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku .

Indikator Kinerja :

Persentase OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.

a. Perbandingan antara target dan realisasi BMD tahun 2019.

Indikator kinerja pendapatan	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi BMD	77%	91%	88%	96%	95	93%

$$= \frac{\text{Laporan BMD OPD yang akurat dan akuntabel}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{23}{26}$$

$$= 88 \%$$

Data Pengukuran Kinerja :
OPD yang menyampaikan BMD

No	Nama OPD	Akurat /Tidak Akurat
1.	Inspektorat	Akurat
2.	Sekretariat DPRD	Akurat
3.	Sekretariat Daerah	Kurang Akurat (penetapan pencatatan status tanah)
4.	BKPPSDM	Akurat
5.	Barenlitbangda	Akurat

6.	BPKAD	Akurat
7.	Bakesbangpol-PBD	Akurat
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Akurat
9.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	Akurat
10.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan LH	Akurat
11.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Akurat
12.	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Akurat
13.	Dinas Pariwisata Pemuda dan olah raga	Akurat
14.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak	Akurat
15.	Dinas Perhubungan	
16.	Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	Akurat
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSPNAKER	Akurat
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Akurat
19.	Dinas Pendidikan	Kurang Akurat (data barang yang rusak berat)
20.	Dinas Pekerjaan Umum	Kurang Akurat (Data Jalan)
21.	RSUD	Akurat
22.	Kantor SATPOL-PP dan Damkar	Akurat
23.	Kecamatan Silungkang	Akurat
24.	Kecamatan Barangin	Akurat
25.	Kecamatan Lembah Segar	Akurat
26.	Kecamatan Talawi	Akurat

b. Realisasi Anggaran

Tabel
Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4	$5 = (4/3) \times 100$
A.	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Daerah	59.758.667.807,00	57.170.993.865,09	95,67
2	Dana Perimbangan Transfer Pusat	550.953.042.509,00	521.592.899.623,00	94,67
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	61.037.370.000,00	60.747.570.000,00	99,53
	Jumlah Pendapatan Th 2019(A)	671.749.080.316,00	639.511.463.488,09	95,20
B.	Belanja dan Transfer			
1	Belanja Operasi	498.572.264.780,00	457.292.466.687,51	91,72
2	Belanja Modal	128.379.222.377,00	94.384.258.018,50	73,52
3	Belanja Tak Terduga	750.000.000,00	67.154.981,00	8,95
4	Transfer	71.390.231.383,00	70.728.943.435,00	99,07
	Jumlah Belanja TA 2019(B)	699.091.718.540,00	622.472.823.122,01	89,04
C.	Surplus/(Defisit) TA 2019 (A-B)	(27.342.638.224,00)	17.038.640.366,08	(62,32)
D.	Pembiayaan			
1	Penerimaan	46.295.009.978,66	12.937.426.797,11	27,95
2	Pengeluaran	18.952.371.754,66	16.607.014.627,72	87,62
	Pembiayaan Netto (D)	27.342.638.224,00	(3.669.587.830,61)	(13,42)
E.	SILPA (C+D)	0,00	13.369.052.535,47	

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawabnya. Keseluruhan program yang telah ditetapkan telah dapat dilaksanakan. Namun tingkat keberhasilannya masih ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya belum diwujudkan secara optimal.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas indikator kinerja, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian Indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “**Sangat baik**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100 % predikatnya “ **Baik** “
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan dibawah 85 % predikatnya “ **Sedang** “
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan dibawah 70 % predikatnya “ **Kurang Baik** “

Berdasarkan hasil uraian yang dikemukakan diatas pada umumnya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019, dapat dilaksanakan secara optimal. Sebanyak 50 kegiatan dapat diuraikan pencapaiannya sebagai berikut :

- 0 kegiatan mencapai 100% (Sangat Baik)
- 27 kegiatan mencapai 85% s/d 100% (Baik)
- 6 kegiatan mencapai 70% s/d 85% (Sedang)
- 17 kegiatan mencapai 0% s/d 70% (Kurang Baik)

Untuk mengukur tingkat capaian dari Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 yang telah dibuat, diperlukan adanya suatu indikator adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 yang telah dibuat, diperlukan adanya suatu indikator adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material teknologi dan lain-lain.
2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 ini baru bisa dilakukan pada tingkat Indikator Keluaran (output) / Indikator hasil (Outcome).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019 memberikan informasi mengenai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang memuat antara lain pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Hasil analisis pencapaian kinerja tahun 2019 sesuai dengan kesepakatan Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kinerja dari 3 sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana (performance plan) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis.

Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung presentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.169.019.644,- dengan Realisasi sebesar Rp.5.096.005.786,- (71,08%). Sisa Anggaran Tahun 2019 Rp.2.073.013.858,-.

Dari data diatas dapat di jelaskan bahwa pada BPKAD Kota Sawahlunto dalam tahun 2019 didukung sebanyak 6 program dan 50 kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini mempunyai 11 kegiatan dengan total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 1.645.146.944,- dibandingkan dengan tahun 2018 program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.644.383.292,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 763.652,- (0,05%), sedangkan dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.557.464.720,- dan tahun 2018 sebesar Rp.1.608.112.339,- adanya penurunan sebesar Rp. 50.647.619,- (3,15%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini mempunyai 8 kegiatan pada tahun 2019 dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.688.665.000,- dibandingkan dengan tahun 2018 prorgam ini mempunyai 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.451.975.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 236.690.000,- (16,30%).

sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 477.186.737,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.272.947.722,- adanya penurunan sebesar Rp. 795.760.985,- (62,51%). Pada program ini terjadi penurunan karena di tahun 2019 ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas yang tidak di realisasikan sedangkan tahun 2018 tidak ada kegiatan tersebut.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 169.230.800,- dan tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 459.800.000,- adanya penurunan anggaran sebesar Rp. 290.569.200,- (63,19%) sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 167.148.902,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 457.106.394,- terjadi penurunan sebesar Rp. 289.957.492,- (63,43)

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini di dukung oleh 26 kegiatan dan mendapat alokasi dana pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.790.975.900,- dan tahun 2018 program ini mempunyai 15 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 842.731.905,- terjadi kenaikan sebesar Rp. 948.243.995,- atau (112,52%), sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.420.687.629,- dan tahun 2018 realisasinya sebesar Rp.716.532.616,- terjadi penambahan sebesar Rp. 704.155.013,- (98,27%). Pada program ini ada penambahan beberapa kegiatan di tahun 2019 sehingga bertambahnya jumlah anggaran secara signifikan di program ini.

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Program ini mempunyai 3 kegiatan dan mendapat alokasi dana pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.861.631.000,- pada tahun 2018 program ini mempunyai 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.601.897.963, terjadi penambahan sebesar Rp. 259.733.037,- (16,21%), sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp.1.466.305.963,- dan tahun 2018 realisasi sebesar Rp.1.461.158.514,- terjadi penurunan sebesar Rp. 5.147.449 (0,35%).

6. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini mempunyai 1 kegiatan dan mendapat alokasi dana pada tahun 2109 sebesar Rp. 13.370.000,- sedangkan realisasinya Rp. 7.211.835,- program ini baru ada di tahun 2019.

Perbandingan antar target dan realisasi program dan kegiatan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah memenuhi 3 (tiga) sasaran yang telah dalam rencana strategis. Fungsi utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto “ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah” telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran utama yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai integral dari sistem pengelolaan keuangan.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan tugas yang dicapai selama ini tidak berarti kinerjanya berjalan secara baik dan lancar, namun masih banyak permasalahan – permasalahan yang memerlukan pemecahan, walaupun masih perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang.

B. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan diatas, maka disarankan kepada semua personil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas di BPKAD Kota Sawahlunto.

2. Kepada semua jajaran di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk dapat melaksanakan semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta lebih meningkatkan koordinasi baik dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sendiri maupun dengan institusi diluar Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
3. Melihat substansi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, sebagai Lembaga Pemerintah yang mengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah perlu dukungan aparat yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Sawahlunto, Januari 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto



AFRIDARMAN, SE

Pembina

NIP. 19730710 200312 1 004

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : **Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Sawahlunto**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DERI ASTA, SH**

Jabatan : **Walikota Sawahlunto**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, September 2019

PIHAK KEDUA

DERI ASTA, SH

PIHAK PERTAMA

AFRIDARMAN, SE

NIP 197307102003121004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Persentase Capaian realisasi Belanja (Quality of Budget planning)	90%
		Maksimal defisit APBD	0%
		Persentase capaian realisasi anggaran	85%
		Persentase capaian realisasi belanja modal (quality of spending) Bidang Pendidikan	20%
		Persentase capaian realisasi belanja modal (quality of spending) Bidang Kesehatan	10%
2	Mengelola Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiscal Space)	95%
3	Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Persentase OPD dengan laporan BMD yang akurat dan Akuntabel	91%

PROGRAM

ANGGARAN

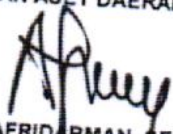
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.645.146.944
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	1.688.665.000
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	169.230.800
4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.790.975.900
5. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp	1.861.631.000
6. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Rp	13.370.000

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA, SH

Sawahlunto, September 2019

PILKEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH


AFRIDARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004



PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019

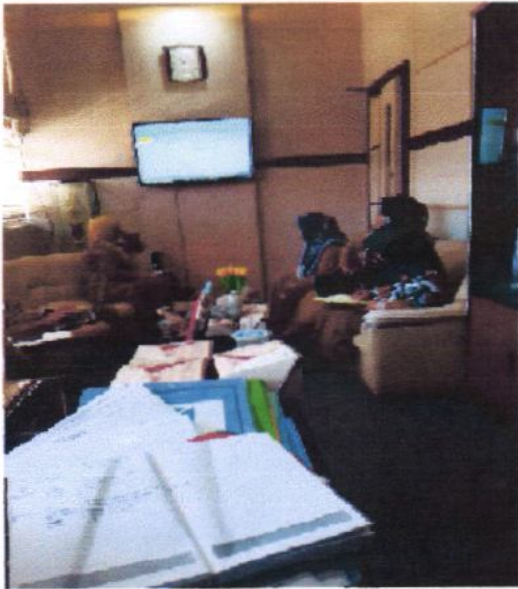


FOTO-FOTO PEMBAHASAN CASCADING DAN PENDAPINGAN
PENYUSUNAN DOKUMEN LAINNYA



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY